



Jurnal

# YUDHAGAMA

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI TNI AD



## PUPIK ORGANIK BERBAHAN DASAR KEONG **SERDA GAZALI**

BABINSA RAMIL 24/IDI TUNONG KODIM 0104/ACEH TIMUR

*sebagai*

**BUKTI KESERIUHAN TNI AD BANTU PEMERINTAH  
WUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN**



■ Istighosah yang digelar TNI - Polri bersama masyarakat.



Hal **6**  
Sinergitas Dalam  
Pluralisme Bangsa

Oleh: **Kolonel Inf Indarto Kusnohadi, S.IP., S.H., M.H.**



Hal **15**  
Kerja sama Kowil dan Instansi  
Daerah dalam Penanggulangan  
Bencana Alam

Oleh: **Kolonel Inf Anhar Premana, S.E.**



Hal **25**  
Komunikasi Sosial (Komsos)  
Menangkal Berkembangnya  
Paham Radikal

Oleh: **Letnan Kolonel Kav Kristiyanto, S.Sos.**



Hal **37**  
Penguatan *Community Development*  
(Comdev) Untuk Cegah Radikalisme  
dan Terorisme

Oleh: **Mayor Arh R. Jatmikoadhi Pramantyo Cahyono, S.E.**



Hal **49**  
"Pupuk keong"  
Babinsa Aceh Timur

Oleh: **Sersan Dua Gazali**



Hal **61**  
Prajurit Sandiyudha Kopassus  
Menghadapi Perang Melalui Media

Oleh: **Lettu Cpl Teguh Imam Santosa**



# PROLOG

**P**embaca setia Jurnal Yudhagama yang budiman, kembali kami hadir menjumpai pembaca sekalian di awal tahun baru 2017, pada Volume 37 Nomor I Edisi Maret 2017. Pada penerbitan edisi kali ini, redaksi menyajikan tulisan-tulisan yang cukup menarik untuk dibaca, karena beberapa tulisan yang ditampilkan membahas tentang kegiatan pembinaan teritorial di satuan komando kewilayahan dan tulisan lain yang membahas tentang pemberantasan radikalisme dan terorisme.

Tulisan yang ditampilkan pada edisi kali ini, layak dibaca dan tentu akan menjadi wawasan dan pengetahuan yang positif bagi pembaca. Tulisan tersebut adalah dari Kolonel Inf Indarto Kusnohadi, S.IP., S.H., M.H. Patun Seskoad dengan judul tulisan Sinergitas dalam Pluralisme Bangsa. Dikatakannya bahwa pluralisme dalam masyarakat Indonesia merupakan sebuah kekayaan budaya bangsa yang sangat tinggi nilainya. Dibalik itu, pluralisme memunculkan potensi-potensi ke arah konflik yang terkadang berujung pada kekerasan. Di Indonesia konflik sosial lebih banyak disebabkan karena masalah SARA.

Dilanjutkan dengan tulisan dari Kolonel Inf Anhar Premana, S.E., Danbrigif Mekanis 6/2 Kostrad dengan judul tulisan Kerja sama Kowil dan Instansi Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam. Menurutnya bahwa Peran TNI terutama dalam penanggulangan bencana di wilayah saat ini belum terlaksana secara maksimal, dikarenakan belum sinkronnya peran satuan Kowil dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana sehingga terjadi kelemahan di lapangan baik pada tahap pra bencana, tahap tanggap darurat maupun pasca bencana.

Tulisan lain yang kami sajikan adalah tulisan dari Letkol Kav Kristiyanto, S.Sos, Dandim 0712/Tegal Korem 071/Wijayakusuma dengan judul tulisan Komsos Menangkal Berkembangnya Paham Radikal. Menurutnya bahwa sebagai seorang komunikator yang baik, seorang prajurit di lapangan juga harus mengetahui media mana yang paling tepat untuk mengirimkan pesan kepada masyarakat dan harus tahu bagaimana cara mengantisipasi gangguan yang kemungkinan akan muncul pada proses pengiriman pesan. Selain itu komunikator yang baik akan bertanggung jawab memberikan tanggapan terhadap umpan balik (*feedback*) yang disampaikan oleh masyarakat selaku pihak penerima (*receiver*).

Selanjutnya tulisan dari Mayor Arh R. Jatmikoadhi Pramantyo

## Jurnal YUDHAGAMA

### **Pelindung**

Kepala Staf TNI Angkatan Darat

### **Pembina**

Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat

### **Staf Ahli**

Irjenad, Aspam Kasad, Asops Kasad, Aspers Kasad, Aslog Kasad, Aster Kasad, Asrena Kasad, Kasahli Kasad

### **Pemimpin Redaksi**

Kolonel Arm Alfret Denny D. Tuejeh

### **Wakil Pimpinan Redaksi**

Kolonel Arh Elman Nawendro

### **Dewan Redaksi**

Kolonel Arh Hamim Tohari, M.A.  
Kolonel Inf Efran Gunawan  
Kolonel Inf Benny Bintoro  
Kolonel Inf Fadjar Tjahyono  
Kolonel Kav Aloysius Nugroho Santoso, S.E., M.Si.

### **Ketua Tim Editor**

Kolonel Inf Machfud, S.E.

### **Sekretaris Tim Editor**

Letkol Inf Drs. N. Ertoto, M.Si.

### **Anggota Tim Editor**

Mayor Caj (K) Yeni Triyeni  
Mayor Inf Dodi Fahrurrozi, S.Sos.  
Mayor Inf Chandra Purnama, S.H.  
Kapten Cku M Hasyim

### **Distribusi**

Kapten Inf Hartono

### **Desain Grafis**

Sertu Herlambang

### **Tata Usaha**

PNS Bambang Sutiono  
PNS Listin

### **Redaktur Foto**

Letda Inf Moch Holil

### **Alamat Redaksi**

Dinas Penerangan Angkatan Darat  
Jl. Veteran No. 5 Jakarta Pusat  
Telp. (021) 3456838, 3811260  
Fax. (021) 3848300

### **Alamat Email**

palaganyudhagama@gmail.com  
dispenad@mabasad.mil.id

### **Website**

<http://www.tniad.mil.id>

### **Blackberry Messenger**

<http://pin.bbm.com/C002D3F2B>

### **Facebook**

<https://www.facebook.com/AngkatanDaratTNI>

### **Twitter**

[https://twitter.com/TNI\\_AD\\_Official](https://twitter.com/TNI_AD_Official)

### **Instagram**

[https://www.instagram.com/tni\\_angkatan\\_darat](https://www.instagram.com/tni_angkatan_darat)

Cahyono, S.E, Kabag Litbangmat Sdirbinlitbang Pussenarhanud Kodiklat TNI AD. Menurutnya dalam kaitannya dengan pemberantasan radikalisme dan terorisme melalui *Comdev*, pendekatan yang digunakan adalah pada aspek kedamaian dan anti kekerasan (*peace and non-violence*) dengan pemberdayaan (*empowerment*). Kedamaian dapat dipahami secara sederhana, sebagai suatu keadaan dimana tidak ada perasaan tertekan, terpaksa, dan konflik.

Selain itu, tulisan lain dari Serda Gazali dengan judul tulisan “Pupuk keong” Babinsa Aceh Timur. Menurutnya Krisis ketahanan pangan menjadi masalah yang paling krusial bagi bangsa ini. Upaya mewujudkan ketahanan pangan harus terus ditingkatkan karena masih banyak lahan yang belum diberdayakan dan hasil produksi pertanian belum mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Berbekal pengalaman ditambah dengan pembelajaran pertanian yang didapatkan dari Jambi, Serda Gazali berusaha menciptakan pupuk baru yang bisa membantu meringankan beban petani, dengan melakukan berbagai percobaan demi percobaan untuk membuat pupuk

organik, pengganti pupuk buatan berbahan kimia..

Berikutnya kami sajikan tulisan dari Lettu Cpl Teguh Imam Santosa dengan judul tulisan Prajurit Sandiyudha Kopassus Menghadapi Perang Melalui Media. Menurutnya Prajurit Grup-3 Sandiyudha berperan dalam menghadapi dampak dari perang melalui media, baik serangan langsung ke instalasi satuan Grup Sandiyudha maupun kepada masyarakat di sekitar satuan, serta penyerasan informasi yang dapat membahayakan dan mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik secara fisik maupun non fisik.

Akhirnya segenap redaksi Jurnal Yudhagama mengucapkan terima kasih, atas sumbangan pemikiran dan pandangan melalui tulisan sehingga berdampak positif terhadap pengetahuan dan wawasan prajurit TNI Angkatan Darat dalam melaksanakan tugasnya baik di satuan Kowil maupun satuan non Kowil guna meningkatkan kemampuan pembinaan teritorial.

**Selamat Membaca !**

## **Jurnal Yudhagama sebagai media komunikasi internal TNI Angkatan Darat, mengemban misi:**

- 1** Menyearluaskan kebijakan Pimpinan TNI Angkatan Darat kepada seluruh prajurit di jajaran TNI Angkatan Darat.
- 2** Memberikan wadah untuk pemikiran-pemikiran yang konstruktif dalam pembinaan TNI Angkatan Darat dan fungsi teknis pembinaan satuan, sesuai tugas pokok TNI Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara matra darat.
- 3** Menyediakan sarana komunikasi untuk penjabaran Kemanunggalan TNI-Rakyat.

Tulisan yang dimuat dalam Jurnal Yudhagama ini merupakan pandangan pribadi penulisnya dan bukan pandangan resmi TNI Angkatan Darat. Redaksi berhak mengubah tulisan (*rewrite*) tanpa menghilangkan substansinya untuk disesuaikan dengan misi yang diemban Jurnal Yudhagama dan kebijakan Pimpinan TNI Angkatan Darat.

Redaksi menerima tulisan dari dalam dan luar lingkungan TNI AD sesuai kebutuhan Jurnal Yudhagama, dengan panjang tulisan maksimal 10 halaman kertas folio, jarak satu setengah spasi.



# SINERGITAS

dalam

# PLURALISME BANGSA

"Negeri ini Republik Indonesia, bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu. Tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke"

(Ir. Soekarno)

**P**luralisme bangsa Indonesia telah ada sejak dahulu kala. Bangsa yang mendiami nusantara ini terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, ras, dan antargolongan yang hidup berdampingan. Pluralisme

berdasarkan literatur dapat diartikan sebagai paham kemajemukan, baik dalam agama, etnis, suku, maupun budaya. Pluralisme tersebut kemudian disatukan dalam ikatan Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika. Apabila kesadaran tentang pluralisme bangsa tidak dapat dikelola dengan baik maka sinergi tidak akan terwujud. Sinergi diartikan sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian, yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar dari pada dikerjakan sendiri-sendiri, dan gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul (Covey, 1989).

Kondisi multi kultural masyarakat pada sebuah bangsa memiliki kemampuan penyatuan (sentripetal) dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sekaligus juga berimplikasi negatif sebagai daya pemecah (sentrifugal) yang berpotensi menimbulkan konflik dalam kapasitas besar. Apabila pluralisme tidak dipelihara dengan baik maka ke depan, eskalasi ancaman internal diprediksi akan meningkat.

Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik seharusnya menggunakan azas kesatuan hukum. Namun hukum syariah di Provinsi Aceh

dan hukum adat di Provinsi Papua, saat ini diberlakukan sebagai hukum positif di sana. Pemberlakuan hukum ini semoga hanya bersifat solusi yang kasuistik semata dan tidak mengarah pada perpecahan atau terbentuknya embrio perubahan terhadap bentuk negara.

Ada indikasi beberapa lembaga

dan pemberdayaan wilayah pertahanan, dianggap sebagai peluang kembalinya TNI ke dalam politik praktis.

Toleransi beragama saat ini telah diracuni oleh pemikiran-pemikiran sempit yang menyerang umat lainnya sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa dan menimbulkan terorisme, apabila



swadaya masyarakat (LSM) dipengaruhi kepentingan dan didanai dari luar negeri (Husain Assa'di, 2008). Kegiatan LSM tersebut mengarah pada radikalisme, terorisme, dan imperialisme terselubung. Di lain pihak, kehadiran TNI dalam mengatasi separatisme, terorisme, pengamanan,

tetap dibiarkan hidup dan berkembang. Terorisme di Indonesia tumbuh subur karena didukung oleh perilaku sebagian masyarakat yang bertentangan dengan filosofi Pancasila. Setelah 'kran' reformasi dibuka dan otonomi daerah diberlakukan, pada hal-hal tertentu terjadi 'kebablasan'

sehingga berkembang euforia primordial dan etnosentris yang sempit. Akibatnya, muncul sikap egois, tidak peduli terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang berbeda. Munculnya etnosentrisme dan primordialisme sebagai dampak pluralisme, apabila jika tidak disikapi dengan bijak akan berpotensi menimbulkan intoleransi, kekerasan, dan radikalisme.

Bung Karno dan kawan-kawannya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, karena menyadari bahwa Indonesia tidak dapat dipersatukan tanpa adanya suatu alat ideologi yang bisa mengikat pluralismenya. Walaupun sudah ada namanya Indonesia, namun tidak dengan serta merta nama tersebut mampu mengikat bangsa Indonesia yang multikultural. Artinya, nama Indonesia sewaktu-waktu bisa hilang jika tidak ada sesuatu yang mengikatnya.

Presiden RI saat ini (2014-2019)

Ir. Joko Widodo, memiliki atensi yang senada terkait dengan masalah pluralisme. Pluralisme bangsa harus dijaga dengan baik karena bangsa Indonesia memiliki keunikan tersendiri jika dilihat dari masalah pluralisme (pengarahan Presiden RI kepada para Pati TNI dan Polri di Istana Negara, tanggal 24 Oktober 2016).

Di bagian lain, TNI Angkatan Darat mempunyai dua fungsi utama yaitu pertempuran dan pembinaan teritorial (Binter) dalam rangka menggemban tugas pokok TNI yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004. Dalam melaksanakan Binter, TNI AD bersinergi dengan pemerintah dan komponen bangsa lainnya untuk menyikapi pluralisme bangsa dengan cara merevitalisasi nilai-nilai luhur Pancasila.

TNI Angkatan Darat, selain merupakan “Kekuatan Pertahanan” juga merupakan “Kekuatan Moral”, dan “Kekuatan Kultural” (Trisula TNI AD).

Sebagai Kekuatan Moral, TNI Angkatan Darat bersinergi dengan pemerintah dan komponen bangsa lainnya memperkuat nasionalisme, wawasan kebangsaan, patriotisme, dan kesadaran bela negara, serta mendukung upaya mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Sebagai Kekuatan Kultural, TNI Angkatan Darat ikut mempertahankan, membangun, dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal budaya bangsa seperti gotong royong, kekeluargaan, toleransi, dan kerelaan berkorban.

Kasad Jenderal TNI Mulyono pada saat apel gabungan di Mabesad menekankan, TNI Angkatan Darat sebagai pengaman dan pilarnya persatuan dan kesatuan bangsa tidak boleh terprovokasi, tetapi harus menjadi pendingin dan menetralisasi setiap kejadian yang mengarah kepada hal-hal yang dapat merusak rasa persatuan dan kesatuan bangsa (<https://tmiad.mil.id/>, diakses pada 3 November 2016).

## PERAN TNI ANGKATAN DARAT

**BAGAIMANA** peran TNI Angkatan Darat dalam meningkatkan sinergitas dengan pemerintah dan komponen bangsa lain, guna mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang pluralistik?

Di era demokrasi dan globalisasi, pluralisme menjadi isu yang sangat penting dan gencar disosialisasikan. Menurut seorang cendekiawan muslim, Prof. Dr. Nurcholish Madjid atau yang populer dipanggil Cak Nur, Indonesia adalah salah satu bangsa yang paling pluralis di dunia. Terdiri atas berbagai macam suku, agama, dan ras, yang secara keseluruhan membentuk tatanan kebudayaan nasional bangsa, yakni kebudayaan Indonesia (Woorward, 1998).

Pluralisme dalam masyarakat Indonesia merupakan sebuah kekayaan budaya bangsa yang sangat tinggi nilainya. Dibalik itu, pluralisme memunculkan potensi-potensi ke arah konflik yang terkadang berujung pada kekerasan. Di Indonesia konflik sosial lebih banyak disebabkan karena





masalah SARA.

TNI Angkatan Darat merupakan miniatur dari kebhinekaan bangsa Indonesia. Dalam integrasi antar prajurit dan masyarakat di sekitar lingkungan bertugas, tidak pernah terjadi penolakan, bersikap lain, bingung, atau canggung dengan pluralitas.

Sebagai prajurit TNI Angkatan Darat yang mempunyai semboyan "Benteng terakhir bangsa", harus bisa menempatkan diri sebagai personel yang mampu menjadi bhayangkari sejati, perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk mendapatkan rumusan pola dan strategi dalam mewujudkan sinergi seluruh komponen bangsa yang plural maka perlu dianalisa rumusan permasalahan sebagai berikut:

**PERTAMA;  
MEMUDARNYA  
PEMAHAMAN  
MASYARAKAT  
TERHADAP NILAI-NILAI  
PANCASILA SEBAGAI ALAT  
PENGIKAT PLURALISME**

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), diwajibkan pelajaran Pancasila seperti halnya pelajaran agama dan kewarganegaraan. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, pelajaran Pancasila dihilangkan, kemudian diikuti pula dengan penghapusan program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan pembubaran Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7).

Mencermati kondisi kehidupan pluralistik masyarakat Indonesia yang rawan terhadap konflik, Indonesia sangat membutuhkan kehadiran Pancasila yang dapat dijadikan sebagai nilai pengikat integrasi (*integrative value*), titik temu (*common denominator*), jati diri bangsa (*national identity*), dan nilai yang baik dan mampu diwujudkan (*ideal value*). Hal ini sejalan dengan pernyataan sejarawan Indonesia, Prof. Dr. Anhar Gonggong (26 September 2016) bahwa negara Indonesia adalah negara yang majemuk, yang apabila tidak ada sinergi di dalamnya, maka bisa "amburadul". Oleh karena itu, para pendiri bangsa

ini menciptakan alat untuk menjamin berjalannya sinergitas dan sebagai alat pengikat, yaitu Pancasila.

Hasil Litbang Kompas (25-27 Mei 2016) di 12 kota besar di Indonesia terungkap; aspek pengenalan sila-sila Pancasila, sikap menghormati orang lain, sikap menempatkan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan, dan kondisi

persatuan bangsa semakin lemah (Kompas, 30 Mei 2016).

Survei lain yang dilakukan oleh Setara Institut Jakarta tentang Pancasila (9-19 Maret 2015) pada 58 sekolah di kota Bandung dan Jakarta, memperoleh hasil yang cukup mengejutkan. Dari 684 responden, 8,5 % setuju Pancasila sebagai dasar negara digantikan dengan agama tertentu ([www.beritasatu.com/kesra/261991.html](http://www.beritasatu.com/kesra/261991.html), diakses 10 Oktober 2016). Hasil survei tersebut memang terlalu dini jika dijadikan parameter secara nasional. Namun bila diambil sisi positifnya menunjukkan gambaran, telah terjadi degradasi nilai Pancasila.

Penyebab paling fundamental dari memudarnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila adalah kurangnya upaya yang sungguh-sungguh dari dunia pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Ali Ibrahim Akbar (2000) menyatakan, bahwa kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (*hard skill*) saja, tetapi lebih karena pengetahuan dalam mengelola diri dan orang lain (*soft skill*). Oleh karena itu, konstruksi pendidikan harus dikaji dan mesti disesuaikan dengan paradigma reformasi, yaitu paradigma pendidikan pluralisme yang berbasis Pancasila.

Mengacu kepada hal tersebut, dalam tataran strategis, TNI Angkatan Darat secara hirarkis melakukan koordinasi dengan kementerian terkait





■ **Pergelaran Wayang Kulit pada Hari Juang Kartika sebagai bentuk pelestarian khasanah budaya Indonesia.**

(Kemenristekdikti dan Kemendikbud) agar mengilmukan kembali Pancasila, dengan jalan memasukkan kembali pelajaran Pancasila ke dalam kurikulum Sisdiknas dengan klasifikasi "Wajib/Mutlak". Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Anhar Gonggong pada wawancara tanggal 26 September 2016, bahwa ditengah-tengah kondisi Pancasila yang terpinggirkan, diperlukan usaha mengaktualisasikan kembali posisinya sebagai ideologi dan pengikat pluralisme.

Di samping itu, TNI Angkatan Darat melalui Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat (Seskoad), dapat melakukan seminar Angkatan Darat berskala nasional, yang bertujuan untuk membuat produk akademis tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang hasilnya selanjutnya diteruskan ke pemerintah dan DPR.

Pada tataran operasional dan taktis,

satuan komando kewilayahan (Satkowil) membantu pemerintah daerah dalam mengajarkan Pancasila kepada anak didik/siswa sekolah, khususnya di daerah terpencil dan desa-desa yang kekurangan tenaga pengajar. Satkowil dalam mendukung program pengajaran Pancasila, dapat membentuk desa-desa Pancasila di daerah-daerah binaan yang menjadi tanggungjawabnya.

## **KEDUA; MELEMAHNYA DAYA TANGKAL MASYARAKAT TERHADAP PENGARUH NEGATIF BUDAYA ASING**

Budaya adalah suatu warisan dari leluhur atau nenek moyang kita yang tidak ternilai harganya. Dalam buku "Primitive Culture" karangan E.B.Tylor dan dikutip oleh Prof. Harsojo (1967) dijelaskan, kebudayaan adalah satu keseluruhan yang kompleks, yang terkandung di dalamnya pengetahuan,

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan-kemampuan yang lain, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota dari suatu masyarakat.

Budaya yang ada pada suatu bangsa memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat bangsa tersebut. Kebudayaan mengatur agar manusia mengerti tentang bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya, kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Budaya merupakan perekat yang sangat penting untuk memersatukan suatu bangsa. Namun banyak orang yang tidak memahami hal tersebut. Ki Hajar Dewantara menyatakan, sesungguhnya Pancasila adalah intisari atau saripati budaya nasional yang mengikat seluruh komponen bangsa ([www.kompasiana.com/eduard\\_tambunan/](http://www.kompasiana.com/eduard_tambunan/) diakses 10 Oktober 2016).

Survei yang dilakukan oleh Health

*Education Authority* (2002) menghasilkan data bahwa usia 15-34 tahun adalah konsumen terbanyak memilih menu cepat saji (*fast food*), yang dikategorikan makanan asing, sebagai menu makanan mereka. Dari kenyataan di atas menunjukkan, begitu rendahnya minat generasi muda terhadap makanan tradisional. Generasi muda menganggap rendah makanan tradisional. Makanan modern yang kurang sehat (*junk food*), dianggap sebagai gaya hidup yang unggul di kalangan generasi muda (*scholar.unand.ac.id diakses 15 Oktober 2016*).

Sejak tahun 2012 hingga Juli 2014, kasus aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta orang, dengan rincian per tahun 750.000 kasus, dan 30 % pelakunya adalah remaja SMP dan SMA (*Ardiantofani, 2014*). Dulu bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupannya selalu dilandasi nilai-nilai agama namun fakta tingginya kasus aborsi menunjukkan adanya pengaruh

pasar modern di Indonesia tumbuh 31,4 % per tahun sedangkan pasar tradisional menyusut 8 % per tahun. Berkembangnya pasar modern tersebut telah menyuburkan hedonisme di masyarakat kita, karena pada pasar modern tidak ada proses komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli secara langsung. Hal ini mengakibatkan hilangnya rasa saling pengertian dan rasa kesetiakawanan sosial di masyarakat (*litbang.patikab.go.id diakses 14 Oktober 2016*).

Penyebab melemahnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh negatif budaya asing adalah kurangnya kebanggaan terhadap nilai budaya bangsa sendiri dan juga faktor media massa. Hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Selly Riawanti, SS., M.A., yang menyatakan, melalui media telah berkembang paham-paham radikalisme di masyarakat dan sulit dikontrol.

Berkaitan dengan itu, pada tataran strategis, TNI Angkatan Darat berperan

berita dan informasi. Adapun pada tataran operasional taktis, Satkowil dapat mendorong pemerintah mengimplementasikan pelestarian kebudayaan nasional dan keberadaan pasar-pasar tradisional sebagai sarana komunikasi sosial. Di samping itu, prajurit perlu dilatih untuk menguasai tradisi budaya dan menggunakan bahasa daerah, dalam pergaulan sosial dengan masyarakat dimanapun ia bertugas.

### KETIGA; MELEMAHNYA FUNGSI PENGONTROL SOSIAL

Teori kontrol sosial merupakan suatu teori tentang penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Kontrol sosial membahas isu-isu tentang bagaimana masyarakat memelihara atau menambahkan kontrol sosial, dan cara memperoleh konformitas atau kegagalan meraihnya dalam bentuk penyimpangan (*Efrank E. Hagan, 2013*).

Berbicara tentang konflik dalam sosiologi, salah satu teori yang memengaruhi adalah apa yang disampaikan oleh Lewis A. Cosser. Cosser (1956) bahwa konflik itu perlu agar tercipta perubahan sosial. Perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan, namun pada suatu titik tertentu masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Ketika konflik berlangsung, Cosser melihat 'katup penyelamat' dapat berfungsi untuk meredakan permusuhan. Mengacu kepada penjelasan di atas, maka katup penyelamat yang dimaksud adalah peran dari pengontrol sosial.

Pemerintah sebagai salah satu pengontrol sosial, berfungsi sebagai pengayom dan pelindung bagi warganya, sekaligus sebagai penjaga tata hubungan interaksi antar kelompok-kelompok berbeda yang ada di Indonesia. Diferensiasi sosial dengan konsekuensi terjadinya heterogenitas dan kesenjangan sosial (*inequality*), memiliki pengaruh



■ Prajurit TNI memberikan penyuluhan Bela Negara.

kuat kebebasan, yang lebih ke budaya liberalisme dan melupakan budaya Pancasila.

Berdasarkan hasil studi AC Nielsen,

dalam mendorong pemerintah untuk lebih menegakkan fungsi pengawasan media, melalui pembentukan *Cyber Task Force*, yang bertugas untuk menyaring



penting terhadap sinergitas suatu masyarakat dan perkembangan sistem demokrasi. Oleh karena itu, heterogenitas dan kesenjangan sosial ini harus dikelola sedemikian rupa demi terciptanya solidaritas dan sinergitas sosial sebagai landasan terwujudnya sinergitas nasional (Prasetyo, dan kawan-kawan, 2008).

Kurang optimalnya pemerintah dalam memainkan peran sebagai pengontrol sosial, ditunjukkan dari persepsi yang berkembang di masyarakat diantaranya:

1. Hukum hanya dapat dinikmati oleh golongan yang mampu;
2. Mencari keadilan adalah upaya yang mahal;
3. Tidak konsistennya putusan hakim dalam beberapa kasus serupa;
4. Masih adanya pengaruh politik dalam proses penegakan hukum.

Dari rangkaian hasil jajak pendapat dan survei tatap muka Litbang Kompas terungkap, mayoritas publik negeri ini menilai aparat penegak hukum di Indonesia belum independen dan bebas dari mafia peradilan (*nasional.kompas.com*, 2016).

Lemahnya pengontrol/pengendalian sosial disebabkan oleh kurangnya penegakan hukum. Menurut J.S. Roucek, keberhasilan pengendalian sosial dapat dilakukan dengan cara:

1. Persuasif, seperti mendidik dan mengajak melalui proses sosialisasi;
2. Dengan paksaan/kekerasan, berwujud penegakan hukum disertai sanksi pada warga yang melanggar. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan penegakan hukum kepada masyarakat, diperlukan adanya 'komunikasi yang efektif' dari aparat pemerintah, sebagai pemecah kebekuan atau kesenjangan

---

■ Aksi damai 212 dilakukan sejumlah Ormas sebagai bentuk protes terhadap dugaan ketimpangan hukum kasus penistaan agama yang dilakukan salah satu pejabat negara.

posisi negara versus masyarakat.

Terkait konteks tersebut, dalam tataran strategis, TNI Angkatan Darat secara hirarkis dapat berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara RI (Kemenpan RI) untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kepemimpinan, agar dapat berkomunikasi secara efektif kepada masyarakat. TNI Angkatan Darat berperan mendorong pemerintah untuk terus melakukan upaya-upaya reformasi hukum. Dalam hal ini, TNI Angkatan Darat perlu membuat kajian strategis tentang pembenahan regulasi, aturan-aturan, dan produk-produk hukum saat ini, agar lebih adaptif dengan perkembangan zaman.

Pada tataran operasional taktis, Satkowil perlu memelopori forum-forum komunikasi antar tokoh adat dan budaya, sebagai upaya sosialisasi

norma-norma, aturan, dan hukum yang berlaku di negara kita. Satkowil perlu bekerjasama dengan kalangan akademisi, mengadakan forum-forum diskusi terkait penegakkan hukum agar masyarakat, khususnya kalangan generasi muda, dapat lebih memahami norma, aturan, dan hukum yang berlaku di negara kita.

### KEEMPAT; MUDAHNYA MASYARAKAT INDONESIA TERPROVOKASI OLEH HASUTAN PROVOKATOR

Berkaitan dengan permasalahan provokasi, sejumlah analisis dari Sekolah Manchester jurusan Social Anthropology (*Gluckman 1954, Turner 1994*), telah menggaungkan dan menggarisbawahi aspek-aspek kerusuhan

etnis, yang salah satunya adalah adanya provokasi. Menurut Gaboriau (1985), “tradisi provokasi” digambarkan sebagai prosedur yang telah dimodifikasi dari ketidakrespekan yang disengaja, penodaan, dan pelanggaran terhadap hal-hal yang keramat atau simbol-simbol, waktu maupun objek.

Untuk membuktikan bahwa masyarakat Indonesia selalu mudah untuk tersulut atau termakan oleh jebakan para provokator, kita dapat melihat beberapa fenomena konflik di Indonesia yang dinilai sangat mengganggu pluralisme, yang semuanya itu terindikasi akibat ulah provokator yaitu:

- » Konflik antar etnis di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya, antara penduduk asli (Dayak dan Melayu) dengan pendatang (Madura), (*Departemen Pertahanan*

■ Prajurit TNI memberikan bantuan pengamanan saat terjadi ledakan Bom di gedung Sarinah, Thamrin, Jakarta.





## Kolonel Inf Indarto Kusnohadi, S.I.P., S.H., M.H.

Lulusan Akmil 1994, memulai karir militernya di Yonif 631/Antang mulai dari Danton, Danki hingga Pasi. Selanjutnya beralih tugas menjadi Kasi Brigif Linud 18/2/Kostrad, Wadanyonif 501/18/2/Kostrad, Kabagminjianbang Seskoad, lalu menjabat sebagai Danyonif 431/1/Kostrad dan Dandim 1309/Manado. Setelah itu pindah tugas ke Mabesad sebagai Pabandya Jabkat 2/Spersad lalu ke Seskoad sebagai Dosen Muda hingga Madya, dan sekarang menjabat sebagai Patun Seskoad. Pendidikan militer yang pernah ditempuh; Sesarcab IF, Kibi Dephan, Suspa Senban, Suslapa, Seskoad, Susjemendik, dan Susopsgab TNI. Sedangkan penugasan yang pernah dijalani; Ops Pam Rahwan, Ops. Rajawali, dan Ops. Pamtas.

Selain telah mengantongi ijazah S1 Ilmu Pendidikan, S1 Ilmu Hukum, dan S2 Ilmu Hukum, saat ini masih menyelesaikan S3 di bidang yang sama.

- Republik Indonesia, 1999).*
- » Konflik Sampit, yang dipicu politisasi kriminalitas pendatang (Madura) dengan penduduk asli (Dayak dan Melayu), (*Rinakil Sukardi, 2005*).
  - » Peledakan bom di Sarinah Jakarta, sebagai akibat pengaruh ajaran Islam radikal.

Guna mencegah masyarakat Indonesia agar tidak mudah tersulut provokasi yang berakibat pada terjadinya konflik, diperlukan adanya wawasan kebangsaan yang kuat dari seluruh komponen masyarakat. Program bela negara dalam bentuk penanaman wawasan kebangsaan, memupuk rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan negara, dan pelatihan tentang hukum dan pendidikan Pancasila, sangat tepat untuk diterapkan di masyarakat. Oleh karena itu, TNI Angkatan Darat perlu terus mendorong stakeholder untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan program bela negara.

TNI Angkatan Darat juga perlu membuat kajian strategis untuk mendorong terbentuknya

suatu badan yang secara khusus menangani masalah ideologi dan wawasan kebangsaan (seperti BP7 yang mengurus masalah ideologi melalui program P4). Apabila badan ini dapat diwujudkan, baik di level pusat maupun daerah, maka akan lebih efektif dalam mengeliminir permasalahan yang ada di lapangan.

Pada tataran operasional taktis, setiap prajurit TNI Angkatan Darat diharapkan ikut serta menanamkan dan menerapkan nilai-nilai persatuan bangsa, mulai dari keluarga dan lingkungan terdekatnya, dalam setiap kegiatan formal maupun non formal. Setiap prajurit harus berupaya mendorong terjadinya pembauran, mencegah tumbuh dan berkembangnya pengorganisasian yang mengkotak-kotakkan masyarakat seperti kesukuan, asal daerah, dan keagamaan, yang cenderung mengeksklusifkan dan mempersempit nasionalisme. Masyarakat juga perlu diarahkan untuk menghindari berkembangnya prasangka buruk yang berkembang sebagai pembenaran berdasarkan SARA tertentu.


## SINERGITAS LANGKAH DAN TINDAKAN

**KONDISI** pluralisme di Indonesia, selain mempunyai implikasi positif juga menimbulkan eksese negatif, seperti munculnya sikap etnosentrisme dan fanatisme yang berlebihan. Sinergitas dalam pluralisme bangsa menjadi penting sekali dalam rangka menjaga stabilitas nasional. Namun, fakta empiris menunjukkan kesadaran akan pluralisme masih terdegradasi.

Upaya mengkristalisasi kesadaran tentang pluralisme bangsa ditengah-tengah masyarakat Indonesia, merupakan suatu hal yang sangat

prioritas saat ini. Untuk itu, seyogyanya Kemenristekdikti dan Kemendikbud memasukkan pelajaran Pancasila ke dalam Kurikulum Pendidikan Nasional dengan klasifikasi “wajib/mutlak”. Di bagian lain, Seskoad menyelenggarakan seminar nasional, Kominfo dan Kemenhan membentuk *Cyber Task Force*, Kemenpan menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan, dan Mabesad perlu terus mendukung Kemenhan dalam mengintensifkan program bela negara.

# KERJA SAMA KOWIL DAN INSTANSI DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM



Saat ini, peran TNI terutama dalam penanggulangan bencana di wilayah belum terlaksana secara maksimal, karena belum sinkronnya peran satuan komando kewilayahan (Kowil) dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Akibatnya, terjadi kelemahan di lapangan, baik pada tahap prabencana, tahap tanggap darurat maupun pasca bencana.

■ Penanganan bencana kebakaran hutan.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Secara geografis, posisi NKRI terletak di antara empat lempeng dunia yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, Pasifik, dan Piliphina, serta berada di jalur “Cincin api Pasifik (*Pasific Ring of Fire*). Di samping itu, di Indonesia terdapat ratusan gunung berapi aktif yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Akibat dari posisi Indonesia yang berada di antara empat lempeng tersebut maka gunung berapi yang ada sering bergejolak, dari status aktif biasa menjadi waspada, bahkan sampai tingkat erupsi (meletus). Selain berakibat pada meningkatnya aktivitas gunung berapi, juga sering terjadi gempa bumi bahkan disertai tsunami. Bencana alam yang terjadi di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, yakni munculnya pemanasan global sebagai salah satu akibat dari kemajuan teknologi. Dampak yang paling terasa adalah iklim yang tidak menentu, sulit diperkirakan kapan saat musim kemarau atau penghujan, ada kalanya kemarau berkepanjangan atau musim penghujan secara terus menerus.

Dari semua uraian di atas berdampak nyata pada seringnya terjadi bencana alam di wilayah Indonesia. Berdasarkan data autentik Badan



Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejak 18 tahun terakhir (1997-2015) telah terjadi bencana alam sebanyak 6.632 kali. Masih segar dalam ingatan kita, bencana gempa bumi yang diikuti dengan tsunami di Aceh tahun 2005

yang berakibat korban tewas sebanyak 126.000 orang, jebolnya waduk Situ Gintung yang menewaskan 90 orang, gempa tektonik di Yogyakarta yang menelan korban 3098 orang, tanah longsor di Ciwidey, banjir bandang di





Wasior Papua Barat, gempa bumi dan tsunami di Mentawai Sumatera Barat, dan kejadian terakhir yang paling menghebohkan adalah meletusnya Gunung Merapi di Sleman Yogyakarta yang menelan korban 206 orang tewas

- termasuk juru kunci Mbah Marijan – dan 1.473 lainnya dirawat di rumah sakit akibat luka bakar awan panas. Selain itu masih banyak bencana alam lainnya yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, bencana alam di beberapa wilayah Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Bencana alam yang pernah terjadi antara lain lumpur Lapindo di Sidoarjo, gempa bumi yang

menimpa wilayah Aceh, Sumbar, Nias Bengkulu, Yogyakarta, Jabar, Sulteng, dan Papua. Bencana banjir banyak menimpa wilayah Kalimantan, Papua, dan Pulau Jawa sedangkan gunung meletus banyak terjadi di Pulau Jawa dan Sumatera. Tanah longsor lebih banyak menimpa wilayah-wilayah pegunungan antara lain Pulau Jawa, Sumatera serta sebagian Sulawesi dan Papua adapun di beberapa tempat wilayah Indonesia telah terjadi angin puting beliung yang menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda.

Dampak dari beberapa bencana alam tersebut, baik yang berskala nasional maupun daerah, telah menimbulkan korban jiwa maupun harta benda yang cukup besar. Akibat yang paling terasa adalah perekonomian lumpuh dan kondisi sosial masyarakat terganggu akibat kehilangan sanak keluarga, harta benda, dan pekerjaan. Di sisi lain, dalam hal penanganan masih adanya kekurangan, baik dari sisi organisasi yang menangani, prosedur maupun mekanisme kerja, serta sistem komando dan pengendaliannya.

Komando kewilayahan (Kowil) harus disiapkan untuk mampu melaksanakan tugas bantuan kepada pemerintah daerah melalui operasi penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan yang terjadi di wilayahnya. Kowil adalah bagian dari organisasi TNI AD yang sudah tergelar di seluruh wilayah, dengan tugas melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat dalam rangka mewujudkan ruang, alat, dan kondisi juang. Kehadiran Kowil pada saat bencana alam terjadi, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Amanat itu menyebutkan bahwa TNI mempunyai tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), di antaranya membantu penanggulangan akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian

bantuan kemanusiaan, serta membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan.

## “Peran satuan Kowil dianggap sangat efektif sebagai ujung tombak TNI dalam memberikan bantuan penanggulangan bencana alam”

Dari uraian dan kondisi tersebut di atas, dapat dirumuskan persoalannya adalah **“Bagaimana meningkatkan peran TNI dalam hal ini Kowil di lokasi kejadian, membantu mengatasi bencana alam bekerja sama dengan instansi terkait, dan apa upaya serta langkah-langkah yang dapat ditempuh?”**. Dengan demikian, dapat terlihat secara nyata bagaimana pelaksanaan peran TNI/Kowil dalam membantu penanggulangan bencana alam. Dalam tulisan ini penulis memfokuskan Kowil sebagai bagian dari TNI dalam memberi bantuan penanggulangan bencana alam di daerah. Hal tersebut dilatarbelakangi pemikiran bahwa satuan Kowil tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ketika dihadapkan pada kejadian bencana alam yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, peran satuan Kowil dianggap sangat efektif sebagai ujung tombak TNI dalam memberikan bantuan penanggulangan bencana alam. Adapun nilai guna dari tulisan ini adalah untuk meningkatkan peran Kowil sehingga pelaksanaan bantuan penanggulangan bencana di daerah yang diberikan dapat terlaksana dengan baik, maksimal, dan berhasil guna sesuai harapan masyarakat.

TNI sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang lahir dan berjuang

bersama rakyat berperan aktif dalam penanggulangan bencana alam sehingga dapat mengurangi dan meminimalkan dampak yang diakibatkan oleh bencana tersebut:

### **Pertama, UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.**

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, tugas pokok TNI dilaksanakan dengan pola Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam tugas OMSP, pelibatan TNI adalah memberikan bantuan kepada Pemda, yang dalam pelaksanaannya diberikan kepada Pemda atau Badan Penanggulangan Bencana melalui gubernur/bupati/walikota dan khusus kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan melalui pimpinan/pejabat Pemda.

### **Kedua, UU RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.**

Berdasarkan UU RI No. 24 tahun 2007 Pasal 11, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 50 Ayat (1), dalam status keadaan darurat bencana, gelar kekuatan TNI/TNI-AD yang mempunyai kekuatan, kemampuan, peralatan, dan logistik dapat terlibat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

### **Ketiga, Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang BNPB.**

Berdasarkan Perpres No. 8 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat (2), Pasal 42, Pasal 47, dan Pasal 48, pelibatan unsur TNI/TNI AD sudah tertuang dalam legislasi yang sah, dengan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

### **Keempat, Peraturan Mendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Cara BPBD.**

Berdasarkan Peraturan Mendagri No. 46 Tahun 2008 Pasal 2, Pasal



6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan seterusnya, keberadaan TNI/TNI AD secara sah dan langsung terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk itu, setiap komandan satuan di wilayah harus mampu melaksanakan koordinasi dengan BPBD agar kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dapat dilaksanakan secara sinergis.

**Kelima. Azas-azas Binter di antaranya kesetaraan dan keterpaduan, kesetaraan.**

Binter dilaksanakan bersama-sama komponen bangsa lainnya, dalam posisi setara dan tidak menempatkan sebagai komponen yang paling dominan sehingga terjadi harmonisasi dalam pelaksanaannya. Sedangkan yang dimaksud keterpaduan, Binter dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan sehingga hasilnya maksimal.

Berdasarkan kondisi umum penanganan bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia hingga saat ini, teridentifikasi beberapa permasalahan mendasar, baik yang berkaitan dengan sistem penanggulangan bencana secara umum maupun berkaitan dengan peran Kowil yang bertugas untuk membantu mengatasi kesulitan rakyat.

Permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

1. Lemahnya sistem deteksi dini dan peringatan dini (*early warning system*) bencana alam, yang jenis dan frekuensinya sangat tinggi di wilayah Indonesia.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat, dalam melaksanakan perlindungan dan pemeliharaan terhadap lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana alam.
3. Lemahnya perangkat hukum dan penegakannya, dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran etika sosial sehingga membuka potensi terjadinya bencana alam atau besaran dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam.
4. Ego sektoral yang menyebabkan penanganan bencana alam oleh elemen-elemen masyarakat, baik institusi formal maupun LSM, tidak terkoordinasikan dengan baik.
5. Kurangnya kesiapan satuan kewilayahan, dalam mengoordinasikan unsur TNI yang ada di wilayah untuk membantu pemerintah menanggulangi bencana alam, baik dari segi kemampuan personel, ketersediaan sarana dan prasarana maupun peranti lunak.

Secara umum permasalahan yang sering terjadi, diklasifikasikan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

■ **Geladi Posko I yang digelar Kowil terkait dengan tugas bantuan penanggulangan bencana alam di daerah.**

# PRABENCANA

## PENCEGAHAN DAN MITIGASI

Belum adanya perencanaan dan pelaksanaan untuk mengurangi risiko-risiko dampak dari suatu bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi dalam bentuk:

### a. Mitigasi struktural

Belum adanya identifikasi bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa dan konstruksi untuk menahan serta memperkuat struktur ataupun membangun struktur bangunan penahan longsor, penahan dinding pantai, dan lain-lain.

### b. Mitigasi non struktural

Belum tersedianya lokasi untuk menghindari wilayah bencana dengan cara membangun menjauhi lokasi bencana, yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah, serta dengan memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah.

### c. Mitigasi Bencana yang Efektif

#### Persiapan

Penilaian bahaya dan peringatan belum maksimal, karena membutuhkan pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan untuk mengetahui kapan harus melakukan evakuasi dan kapan saatnya kembali ketika situasi telah aman.

#### Kesiapsiagaan

» **Penyusunan Organisasi.** Pengorganisasian belum sinkron antara perkasad No 96/XI/2009

tentang PRC PB (Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana) dan peraturan pemerintah tentang penanggulangan bencana alam, baik BNPB maupun BPBD. Peran Kowil belum terkoordinasi dan terorganisasi secara baik. Pelibatan satuan Kowil bersifat insidental pada saat tanggap darurat saja, sedangkan pada saat prabencana tidak dilibatkan. Organisasi PRC PB TNI yang terbentuk sekarang ini sudah cukup baik namun belum dapat menjawab tantangan penanggulangan bencana yang terjadi hampir di semua daerah. Di sisi lain, organisasi masih terbentuk hanya di beberapa tempat tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam penanggulangan bencana di wilayah.

» **Sarana prasarana.** Sarana prasarana yang tersedia belum siap. Saat ini satuan Kowil hanya siap personelnya saja, sehingga saat bencana datang penanggulangan bencana sering terhambat karena sarana yang sangat terbatas.

» **Anggaran.** Di satuan jajaran Kowil tidak tersedia anggaran khusus untuk penanggulangan bencana, padahal bila terjadi bencana selalu membutuhkan anggaran untuk menggerakkan pasukan, terkait dengan kebutuhan BBM, logistik dan lain sebagainya. Pada saat terjadi bencana, muncul lepas libat penanggung jawab anggaran. Ketika satuan mengajukan anggaran kepada Pemda, selalu terjadi kendala Pemda tidak mendukung, dengan alasan TNI adalah organisasi vertikal maka pengajuan dana ditujukan ke komando di atasnya.

» **Latihan.** Latihan dalam penanggulangan bencana alam masih sangat jarang dilaksanakan, bahkan ada Kowil yang tidak pernah melaksanakan



■ Media Center posko utama penanggulangan bencana alam.

latihan penanggulangan bencana karena dirasa tidak ada gejala terjadinya bencana di wilayahnya.

» **Koordinasi.** Belum adanya koordinasi yang signifikan antara Pemda dengan Kowil sebagai kekuatan utama pasukan penanggulangan bencana. PRC PB tingkat Kowil sampai saat ini belum berjalan efektif sehingga pelibatan satuan Kowil belum terwadahi secara maksimal, masih berjalan sendiri-sendiri tidak terkoordinasikan dengan baik.

#### Peringatan dini

Belum adanya Protap tanda bahaya, baik alami maupun buatan, seperti alarm, bunyi kentongan dan pengumuman lewat masjid, agar sedini mungkin gejala bencana dapat diketahui masyarakat.



## TANGGAP DARURAT

### 1. Evakuasi korban

Saat ini, penanganan evakuasi korban masih sering terlambat karena:

- Proses pengerahan pasukan Kowil masih terlambat karena menunggu perintah.
- Sarana evakuasi korban masih terbatas, seperti kantong-kantong mayat, sarana angkut termasuk juga sarana pengamanan bagi personel penolong.

### 2. Penyiapan sarana prasarana darurat

Sarana prasarana darurat masih

sangat kurang bagi para pengungsi, seperti mandi, cuci, kakus (MCK), tenda-tenda penampungan, dan rumah sakit lapangan.

### 3. Tenaga medis

Tenaga medis yang dimiliki satuan Kowil masih sangat terbatas, hanya satu peleton kesehatan dengan kemampuan hanya pada kesehatan lapangan. Tidak semua satuan mempunyai tenaga dokter (dokter batalyon) sehingga dalam menangani korban-korban bencana masih sering terhambat.

## PASCA BENCANA

Keterlibatan satuan Kowil saat pasca bencana masih sangat kurang, karena setelah tahap tanggap darurat selesai Kowil jarang dilibatkan, baik

terkait dengan rehabilitasi maupun rekonstruksi.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, beberapa upaya dan langkah-

langkah dapat dilaksanakan Kowil agar perannya dalam memberikan bantuan penanggulangan bencana, yang bekerja sama dengan instansi terkait dapat berjalan maksimal, yakni:

## PADA TAHAP BENCANA

### 1. Pencegahan dan Mitigasi

Diharapkan adanya perencanaan dan pelaksanaan untuk mengurangi risiko-risiko dampak dari suatu bencana yang dilakukan sebelum bencana terjadi, dalam bentuk:

#### a. Mitigasi struktur

Bersama-sama aparat Pemda dan unsur terkait, mengidentifikasi bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa dan konstruksi untuk menahan serta memperkuat struktur ataupun membangun struktur bangunan penahan longsor, penahan dinding pantai, dan lain-lain sehingga dapat diantisipasi bangunan-bangunan yang rawan terkena dampak bencana.

#### b. Mitigasi non struktural

Bersama-sama aparat terkait membantu mencari/menyediakan lokasi untuk menghindari wilayah bencana, dengan cara membangun yang menjauhi lokasi bencana, yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah, dengan memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah.

#### c. Persiapan (*preparedness*)

Memaksimalkan penilaian bahaya dan peringatan, menambah pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena bencana dan sistem peringatan bencana untuk mengetahui kapan harus melakukan evakuasi dan kapan saatnya kembali ketika situasi telah aman.

### 2. Kesiapsiagaan

#### a. Penyusunan organisasi

- » Kowil harus dilibatkan dalam organisasi PRC PB TNI tingkat Kowil (wilayah).



■ Simulasi penanggulangan bencana alam tanah longsor dan uji coba Protap satuan yang dilaksanakan Kowil bekerja sama dengan BPBD

- » Organisasi tersebut harus ada sinkronisasi antara TNI melalui Perkasad No 96/XI/2009 tentang PRC PB, khususnya PRC PB tingkat Kowil dengan peraturan pemerintah tentang penanggulangan bencana alam, khususnya BPBD.
- » Organisasi yang disarankan adalah organisasi terpadu antara Satkowil sebagai koordinator wilayah, Pemda beserta unsur-unsur yang terkait seperti kesehatan, dinas PU, komunikasi, dan lain-lain. Kowil sebagai pasukan reaksi cepat dan dilengkapi dengan unsur lain seperti SAR, LSM, Pramuka, organisasi kemasyarakatan, dan media massa, baik elektronik maupun cetak yang ada di wilayah.
- » Organisasi dipimpin oleh bupati, wakilnya adalah dandim sedangkan komandan pasukan reaksi cepat di lapangan adalah Dansat Kowil.
- » Organisasi dapat ditambahkan unsur-unsur TNI di wilayah tersebut seperti satuan Bekang, Peralatan, Zeni, dan satuan lainnya sesuai dengan kondisi di wilayah tersebut.

#### b. Sarana prasarana

Apabila secara organisasi sudah terbentuk maka satuan Kowil tidak berdiri sendiri lagi dalam menanggulangi bencana alam sehingga sarana prasarana harus dilengkapi, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan dijadikan sebagai prasarana baku Satgas penanggulangan bencana daerah. Sarana prasarana yang disiapkan berdasarkan kemungkinan terjadinya bencana di wilayah tersebut diantaranya:

- » Sarana angkut seperti truk, ambulans, alat berat, perahu karet, kapal cepat, kantong-kantong mayat, dan sebagainya.
- » Sarana kesehatan. Dalam masa prabencana sudah disiapkan rumah sakit terdekat yang dapat menampung korban, pengadaan rumah sakit lapangan, dan tersedianya obat-obatan untuk penanganan korban ringan dan berat.

#### c. Anggaran

Karena Kowil tidak mempunyai anggaran khusus maka anggaran sudah masuk di dalam anggaran Satgas tersebut. Untuk menghindari terjadinya keterlambatan penanganan bencana alam hanya karena anggaran, harus ditempuh langkah sebagai berikut:

- » Pemerintah harus mengambil kebijakan mengalokasikan anggaran, baik dari APBN maupun APBD.
- » Anggaran yang sudah siap sedia tersebut harus mudah dalam proses pencairan dana dengan

adanya Protap anggaran yang jelas, sehingga dalam pengerahan personel Kowil sebagai satuan awal terdepan dalam penganggulangan bencana, tidak terhambat karena tidak ada dukungan anggaran.

- » Anggaran tersebut dikelola oleh Pemda setempat dan peruntukannya tidak harus menunggu petunjuk dari pusat.

#### d. Latihan

Latihan dapat dilaksanakan secara terus menerus sesuai dengan organisasi dan fungsi masing-masing, berupa:

- » Latihan simulasi bencana. Latihan tersebut dilaksanakan secara terus menerus oleh seluruh Satgas dengan masyarakat. Sebagai contoh, simulasi yang dilakukan meniru pramugari pesawat, pramugari selalu menunjukkan peragaan apabila terjadi gangguan dalam pesawat. Peragaan dilakukan setiap penerbangan, walaupun mungkin banyak penumpang yang sudah hafal. Namun peragaan tersebut sangat penting, bersifat mengingatkan secara terus menerus. Dalam simulasi penanggulangan bencana diperagakan setiap saat dan dimana saja, baik di sekolah, pasar, perkampungan/permukiman, perkantoran, dan sebagainya sehingga dengan latihan secara terus-menerus maka akan menjadi terbiasa, dan apabila terjadi bencana yang sesungguhnya, baik masyarakat maupun satuan mengerti apa yang akan dilakukan.
- » Melaksanakan gladi posko Kowil dalam penanggulangan bencana alam di wilayah untuk melatih unsur-unsur Komando maupun unsur-unsur penanggulangan di lapangan.
- » Membuat Protap baku penanggulangan bencana alam baik satuan penolong maupun masyarakat untuk menjadi acuan apabila terjadi bencana alam. Protap tersebut dapat dibeda-bedakan berdasarkan kemungkinan bencana yang terjadi, seperti Protap apabila terjadi tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan.

#### e. Koordinasi

Dengan tergabungnya Kowil tergabung dalam organisasi Satgas maka koordinasi akan menjadi mudah dalam:

- » Pelibatan Kowil apabila terjadi bencana di wilayahnya secara otomatis, tanpa harus menunggu keputusan Komando Atas.
- » Prosedur pelaporan ke Komando Atas tetap dilaksanakan sambil penanggulangan berjalan.



## Kolonel Inf Anhar Premana, S.E.

Alumni Akmil 1995 yang meniti karier militernya di satuan jajaran Kostrad ini, pernah menjabat sebagai Danton Yonif Kostrad (1996), Dantonbant/A Yonif L-431 Kostrad (1996), Pasi-2 Udara Brigif L-3 Kostrad (1999), Dankibant Yonif L-3 Kostrad (2002), Wadan Denma Brigif L-3 Kostrad (2004), PS. Gumil Gol-IV Deptik Pussenif (2005). Selanjutnya menempati jabatan sebagai Pabanda Kat Spaban-III/Binkar Spersad (2007), Pabanda Jab Gol V dan VI Spaban III/Binkar Spersad (2006), Pabandya Binkar Spersdam V/BRW (2010), Danyonif 515/9/2 Kostrad (2012), Dandim 1009/PLH Rem 101/ANT Dam VI/MLW (2013), Waaster Kasdivif 2 Kostrad (2014), dan sejak 2015 hingga sekarang menjabat sebagai Danbrigif Mekanis 6/2 Kostrad.

Pendidikan pengembangan umum yang pernah diikuti mulai Sussarcabif (1996), Combat Intel (1996), Sussar Para (1996), Susdanki (2002), dan Susdanyon (2011), serta Pembekalan Dandim (2013). Sedangkan pendidikan militer terakhir, Seskoad (2010).

- » Apabila satuan penanggulangan bencana daerah tersebut menjadi korban bencana alam sehingga tidak dapat mengatasi bencana di wilayahnya, maka segera koordinasi dengan satuan penanggulangan bencana terdekat atau di wilayah sekitarnya.

## PADA TAHAP TANGGAP DARURAT

### 1. Evakuasi korban

Evakuasi korban dilaksanakan secepat mungkin dengan dasar:

- » Organisasi yang sudah terbentuk sehingga sudah jelas siapa berbuat apa, tanpa harus menunggu petunjuk.
- » Sarana evakuasi korban tersedia, baik sarana angkut maupun kantong-kantong mayat.
- » Mengutamakan evakuasi korban yang masih hidup ke tempat yang aman dari bencana.
- » Segera setelah evakuasi korban hidup, dilanjutkan dengan evakuasi korban meninggal dunia, pengurusan identifikasi, dan pemakaman, baik yang ditangani keluarganya maupun pemakaman secara massal.

### 2. Pengadaan sarana prasarana darurat

Secepat mungkin penyiapan sarana prasarana darurat seperti:

- » Rumah sakit lapangan untuk membantu perawatan korban yang masih hidup.
- » Mendirikan MCK lapangan.
- » Mendirikan dapur lapangan dan pengadaan logistik untuk para pengungsi.
- » Mendirikan tenda penampungan darurat.

## PADA TAHAP PASCA BENCANA

Kowil harus terlibat dalam pasca bencana maupun rekonstruksi terbatas seperti:

- » Ikut serta membangun kembali bangunan dan sarana prasarana yang rusak.
- » Rehabilitasi terbatas, baik fisik maupun mental, seperti pendekatan keagamaan dan rehabilitasi fisik, dengan terlibat dalam membangun kembali sarana prasarana umum yang rusak, perbaikan maupun mendirikan perumahan masyarakat.

Dari uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa saat ini peran TNI dalam penanggulangan bencana di wilayah belum terlaksana secara maksimal, karena belum sinkronnya peran satuan Kowil dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Akibatnya, terjadi kelemahan di lapangan, baik pada tahap prabencana, tahap tanggap darurat maupun pasca bencana. Dengan demikian, diperlukan adanya upaya dan langkah-langkah dalam penanganan bencana secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

Dengan adanya upaya dan langkah-langkah tersebut, diharapkan penanggulangan bencana alam di daerah dapat terlaksana secara maksimal, terkoordinasi, dan mencapai sasaran. Pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Kowil bekerja sama dengan instansi terkait, dirasa masih banyak kekurangan dan kendala sehingga disarankan: **Pertama**; agar anggaran penanggulangan bencana di daerah didukung dari anggaran pusat (APBN) maupun anggaran daerah (APBD). **Kedua**; agar Kowil di seluruh Indonesia harus masuk dalam organisasi penanggulangan bencana di daerah.



# KOMUNIKASI SOSIAL (KOMSOS)

**Menangkal Berkembangnya**

**Paham Radikal**

**Sebagai seorang komunikator yang baik, seorang prajurit di lapangan harus mengetahui media mana yang paling tepat untuk mengirimkan pesan kepada masyarakat, sekaligus tahu bagaimana cara mengantisipasi gangguan yang kemungkinan akan muncul selama proses pengiriman pesan tersebut. Selain itu, sebagai komunikator yang baik, ia akan bertanggung jawab memberikan tanggapan terhadap umpan balik (*feedback*) yang disampaikan masyarakat selaku pihak penerima (*receiver*).**

## KONDISI FAKTUAL INDONESIA

**N**egara Kesatuan Republik Indonesia sejak diproklamkan pada 17 Agustus 1945 adalah harga mati, yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, dalam kondisi dan keadaan apapun. Jiwa nasionalisme dan cita-cita untuk lepas dari penjajahan terinspirasi dari lahirnya Boedi Oetomo tahun 1908, yang merupakan tonggak munculnya generasi bangsa yang terdidik dan unggul.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas, dengan masyarakat yang multikultural dan heterogen, harus selalu memegang teguh komitmen semangat kebangsaan tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda, yaitu berbangsa yang satu bangsa Indonesia, bertanah air satu yaitu Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia. Hal tersebut juga dibarengi dengan pengakuan terhadap bendera kebangsaan adalah Bendera Merah Putih dan lagu kebangsaan yaitu Lagu Indonesia Raya. Semuanya menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghendaki persatuan dan kesatuan bangsa dan tidak mau terpecah belah dengan alasan apapun.

Reformasi berkedok demokratisasi yang telah berjalan sangat cepat, secara faktual telah dicemari oleh berbagai tindakan kekerasan berupa konflik antar warga dan agama, yang mengancam disintegrasi bangsa dengan menuntut untuk memisahkan diri dari NKRI. Dalam kondisi demikian, merupakan suatu kewajiban bagi seluruh anak bangsa

untuk selalu menjadikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pedoman hidup dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI.

pergaulan dan kerjasama yang saling menguntungkan, akibat relasi dunia internasional tumbuh semakin intens, sekaligus menimbulkan konsekuensi makin rentannya terhadap penyusupan ancaman terhadap

keutuhan NKRI dari luar negeri. Tantangan baru yang muncul ke depan memiliki dua dimensi, yaitu kecepatan dan cakupan. Negara tidak boleh kecolongan menjaga keutuhan NKRI akibat terlambat dalam mengantisipasi kecepatan dan meluasnya ancaman, karena tidak tahu bagaimana mengambil sikap dalam konteks dunia yang terus berubah.

TNI sebagai hak milik bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat mengambil peran strategis untuk mempererat hubungan seluruh komponen masyarakat Indonesia, dengan berupaya secara optimal untuk mengeliminir konflik yang tidak perlu. TNI sebagai institusi terdepan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, akan terus berupaya secara nyata untuk

menegakkan kewibawaan pemerintah serta meredam sikap-sikap anarkis kelompok masyarakat, dengan berbagai upaya yang salah satunya adalah melalui komunikasi sosial (Komsos) TNI.

Kemajuan teknologi digital di satu sisi telah melahirkan kemudahan kelompok radikal untuk menarik, merekrut, dan menyebarkan pengaruhnya bagi generasi muda Indonesia. Namun era teknologi digital tersebut juga harus dijadikan peluang dalam meretas jalan integrasi seluruh masyarakat Indonesia. TNI AD dapat mengambil keuntungan, dengan memanfaatkan Komsos untuk menjaga dan menegakkan keutuhan NKRI. Paham radikal yang menjamah kelompok pemuda usia produktif 18 sampai dengan 30 tahun telah menyebar secara luas se-antero negeri, termasuk wilayah Jawa Tengah yang justru disinyalir sebagai sumber pencetak kelompok radikal utama di Indonesia. Ambarawa sebagai daerah penyangga ibu kota Provinsi Jawa Tengah, tentu akan terimplikasi oleh pengaruh paham radikal yang berkembang di daerah Solo,



■ Babinsa Koramil-14/ Mondokan Serka Cucuk KW melaksanakan kegiatan komsos

Indonesia adalah negara demokrasi besar yang menjunjung nilai-nilai agama dan adat istiadat masyarakat yang tersebar di 17.508 pulau, dihuni oleh penduduk sebesar 254,9 juta jiwa dengan 1.331 suku bangsa, 746 bahasa daerah, serta dengan garis pantai sepanjang 99.093 km<sup>2</sup>. (Menkominfo, Harkitnas 2016). Menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa Indonesia secara konsisten untuk menjaga, melindungi, dan memelihara tegaknya NKRI dari gangguan apapun, baik dari dalam maupun dari luar, dengan menerapkan prinsip dan nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Komitmen terhadap NKRI tersebut sangat penting, mengingat setelah sekian lama berdiri sebagai bangsa, ancaman dan tantangan terhadap keutuhan NKRI tidak selangkah pun surut. Bahkan melalui kemajuan teknologi digital, ancaman radikalisme dan terorisme mendapatkan medium baru untuk melaksanakan penyebaran dan praktek kegiatannya. Lanskap dunia yang telah mengaburkan batas fisik antara domestik dan internasional, melahirkan potensi

Temanggung, Kendal, dan daerah lainnya. Keberadaan satuan jajaran TNI AD di wilayah tersebut harus mampu membawa pengaruh besar dalam menangkali pengaruh paham radikal.

Selanjutnya timbul pertanyaan, bagaimana optimalisasi Komsos yang dapat dilakukan oleh Kodim dalam rangka menangkali pengaruh paham radikal? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat dirumuskan persoalan sebagai berikut: *Pertama, bagaimana pola komunikasi sosial yang diterapkan untuk menangkali pengaruh paham radikal? Kedua, Bagaimana eksistensi prajurit dalam investasi kepercayaan masyarakat di desa binaan dikaitkan dengan isu radikalisme?*

Untuk diketahui, wilayah sekitar Ambarawa memiliki karakteristik khusus, yakni merupakan kota perjuangan yang memiliki sejarah panjang dalam mengusir penjajah, sekaligus di sana terdapat berbagai paham radikal, baik yang berafiliasi dengan kelompok kiri maupun kelompok kanan. Berdasarkan data, kelompok garis keras FPI di daerah Ambarawa memiliki basis massa sekitar 315 orang (yang terdaftar), dihadapkan dengan adanya daerah tempat hiburan yang menjadi salah satu ikon daerah dingin di Ambarawa yaitu Bandungan. Sedangkan data tentang warga masyarakat yang terkait dengan kasus 1965, di wilayah ini terdapat berbagai organisasi yang menyebar di sekitar desa binaan Kodim 0714/Salatiga, yaitu PAPERNAS (Partai Persatuan Nasional) dengan kekuatan sekitar 217 orang, SKS (Setia Kawan Sejati) yang merupakan eks Tapol 1965 Kabupaten Semarang dengan anggotanya sekitar 15 orang, IKOHI (Ikatan Korban Orang Hilang) eks-1965 sejumlah 17 orang, dan LPR KROB (Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban rezim Orde Baru) sejumlah 45 orang. Dari data tersebut tentu dibutuhkan peran aktif Dandim 0714/Salatiga, dalam menggerakkan prajuritnya untuk secara terus menerus memacu diri melalui Komsos di desa binaan masing-masing, sebagai bentuk upaya menangkali pengaruh paham radikal dan mencegah kemungkinan konflik antar kelompok di wilayah Ambarawa.

- Saka Wira Kartika Kodim 1412/Kolaka juara 1 navigasi darat tingkat nasional dalam Perkemahan Peran Saka Nasional di Kendari 2015.



## “TNI SEBAGAI INSTITUSI TERDEPAN YANG MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN KETATANEGARAAN, AKAN TERUS BERUPAYA SECARA NYATA UNTUK MENEGAKKAN KEWIBAWAAN PEMERINTAH SERTA MEREDAM SIKAP-SIKAP ANARKIS”



- Penyelenggaraan Komunikasi Sosial (Komsos) Koramil 1704-07/Seget – Papua, dengan komponen masyarakat (Komas) Distrik Seget.

## MELIHAT POTENSI MASYARAKAT

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan bermartabat, memiliki semua prasyarat untuk menjadi bangsa yang sejahtera, namun potensi yang belum tergarap dengan optimal ikut berpengaruh terhadap mental masyarakat yang kurang percaya diri, tak terkecuali prajurit TNI AD. Hal ini tentu berdampak terhadap pola sikap, pola tindak, dan perilaku prajurit dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya yang terkait langsung dengan kegiatan bersama masyarakat, seperti pelaksanaan Binter (pembinaan teritorial) satuan non Kowil Komsos (komunikasi sosial) dengan komponen masyarakat.

## POLA KOMSOS YANG DITERAPKAN UNTUK MENANGKAL PENGARUH PAHAM RADIKAL

Fakta-fakta yang terkait dengan kondisi penerapan pola Komsos yang dilakukan prajurit saat ini adalah:

**Pertama.** Komsos yang dilakukan masih sebatas tugas formal untuk menunaikan kewajiban. Hal ini dapat terlihat secara jelas dalam kegiatan yang dilaksanakan, seperti: 1) Prajurit datang dan bergaul dengan masyarakat saat ada kegiatan program dari satuannya; 2) Prajurit mendatangi desa sekitar satuannya karena terdorong adanya kepentingan tertentu yang bersifat pragmatis; 3) Program Binter satuan belum diterjemahkan dalam kegiatan yang riil secara bersama-sama untuk kepentingan masyarakat luas, namun sebatas pada pelaksanaan program yang diinginkan satuan sehingga cenderung memaksakan program; 4) Hubungan yang dijalin satuan, yang dilakukan prajuritnya, didorong oleh kepentingan satuan; 5) Komsos masih lebih mengedepankan hasil instan dalam bukti dokumentasi kegiatan dan absensi sehingga jauh dari hakekat tujuan Binter jangka panjang, yakni demi tetap tegak kokohnya persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI;

**Kedua.** Sasaran Komsos yang dilakukan masih terbelenggu oleh sasaran yang ingin dicapai dalam suatu direktif, dihadapkan dengan dislokasi satuan serta hakekat ancaman yang kemungkinan muncul di tiap wilayah yang berbeda. Hal ini menjadi bias sehingga suatu sasaran yang sebenarnya lebih penting dan mendesak akan tersisihkan oleh sasaran program yang mungkin kurang sesuai;

**Ketiga.** Kemampuan prajurit untuk melaksanakan Komsos dalam semua strata di masyarakat masih kurang, hal itu disebabkan kurangnya kemauan prajurit dalam mengasah dan mengisi *knowledge* untuk meng-*update* pengetahuan dan pengalamannya. Sebagai prajurit TNI AD, kita tidak menyadari sepenuhnya bahwa lingkungan masyarakat di sekitar kita telah berkembang secara dinamis. Tingkat pendidikan masyarakat desa yang dulu dikategorikan kurang dan cenderung dianggap bodoh, hal ini masih cukup melekat di pemikiran sebagian besar prajurit, padahal taraf hidup masyarakat telah meningkat dan sudah cukup menyadari pentingnya pendidikan untuk generasi penerus. Suatu keluarga dengan pendidikan rendah, misalnya yang dulunya tidak lulus SD atau SR, telah menjelma dengan memiliki pengetahuan yang cukup baik, seiring dengan kemampuannya untuk memberikan pendidikan tinggi ke anak-anaknya. Sifat adaptif manusia termasuk dalam hal kesadaran pendidikan tersebut, telah menaikkan standar pengetahuan masyarakat, yang apabila tidak diimbangi oleh pengetahuan dan kemampuan prajurit dalam berkomunikasi, mereka akan menjadi minder;

**Keempat.** Tingkat pemahaman dan pendalaman prajurit terhadap berbagai organisasi kemasyarakatan di

lingkungannya, khususnya yang berbau radikal dan ekstrem, masih belum optimal. Hal itu akan sangat terasa saat diajak berdiskusi tentang keorganisasian, ia cenderung menghindari ataupun menggunakan pola Komsos yang bersifat pemaksaan dengan kata - kata “pokoknya” ataupun “harus”. Keadaan seperti ini akan menimbulkan penilaian dari warga masyarakat yang memiliki *knowledge* bahwa prajurit sekarang adalah “bodoh” dan tidak pengalaman dalam menangani organisasi masyarakat; dan

**Kelima.** Prajurit TNI AD yang berada di satuan kewilayahan sejatinya masih belum terlatih menangani suatu permasalahan yang mengedepankan dialogis namun masih cenderung represif. Hal ini karena dalam lembaga pendidikan pembentukan belum diberikan materi penunjang untuk membuka wawasan prajurit yang kedepannya dapat diasah setelah masuk satuan kewilayahan.

Harapan yang diinginkan dalam pola Komsos prajurit,



khususnya TNI AD, ke depan, dihadapkan dengan peliknya permasalahan bangsa yang dinamis. Hal ini seiring dengan era teknologi digital, dimana Komsos dapat digunakan untuk membangun sebuah konsep diri, kelangsungan hidup, aktualisasi diri, perolehan suatu kebahagiaan, dan melepaskan diri dari suatu tekanan maupun ketergantungan. Melalui Komsos, semua umat manusia dapat bekerja sama dengan anggota masyarakat (keluarga, kelompok belajar, perguruan tinggi, RT, RW, desa, kota, dan negara secara keseluruhan) sehingga dengan hasil komunikasi tersebut dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan bersama yaitu persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI.

Semua kegiatan kemasyarakatan, baik radikal kanan maupun kiri, harus dapat dibatasi ruang dan dimensinya agar organisasi tersebut tidak dapat mengembangkan diri

■ Komsos Babinsa dengan petani tembakau.



di wilayah binaan satuan jajaran TNI AD. Komsos TNI AD adalah hubungan yang merupakan suatu keniscayaan, yang harus dilaksanakan antara individu prajurit dengan kelompok atau antarkelompok masyarakat, yang merupakan komunikasi dalam rangka mencapai satu tujuan yang ingin dicapai bersama (interaksi) yakni peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa. Semua kegiatan dan hubungan yang lebih baik, seyogyanya diarahkan kepada pencapaian suatu situasi integrasi sosial guna mengenal, mengetahui, memahami, kemudian menjadikan suatu sentuhan sebagai simplikasi dari Komsos yang telah dilakukan oleh para prajurit TNI AD dengan para anggota masyarakat sehingga terjadi suatu kesepakatan bersama di wilayah. Selanjutnya berakumulasi menjadi kesepakatan nasional yang pada akhirnya membentuk persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu tujuan Komsos adalah terbentuknya aktualisasi diri pribadi, stabilitas sosial, tertib sosial, dan penerusan nilai-nilai lama dan baru di masyarakat sehingga dapat memupuk, membina, dan memperluas kesadaran bermasyarakat. Komsos berkaitan erat dengan komunikasi antar satuan/institusi dalam pembangunan di bidang keamanan dan bagaimana komunikasi itu harus dilakukan, sehingga berperan sebagai penunjang pelaksanaan program-program pembangunan lain dalam rangka menciptakan perubahan pada suatu sistem sosial yakni perubahan sosial (*social changes*) yang aman.

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencari solusi terhadap permasalahan terkait dengan upaya menangkal pengaruh paham radikal, melalui pola Komsos, antara lain:

**Pertama.** Komunikasi sosial antara prajurit dengan masyarakat akan terwujud, bila terjadi suatu interaksi sosial dengan berbagai inovasi baru yang direncanakan, sebagai konsekuensi wujud dari tujuan/kebutuhan yang sama. Inovasi-inovasi baru yang muncul tersebut dapat diimplementasikan untuk mengatasi setiap permasalahan yang timbul dalam suatu sistem sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi gesekan-gesekannya. TNI AD sebagai bagian dari komponen bangsa berusaha mewujudkannya dalam suatu wadah pembinaan teritorial, yang pada intinya untuk memberdayakan potensi masyarakat di suatu daerah. Dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan suatu wilayah, upaya pemberdayaan wilayah ini sebenarnya realisasi dari inovasi-inovasi yang muncul dari interaksi sosial, yang bermuara dari adanya komunikasi sosial dalam sistem sosial yang ada. Artinya, TNI ikut serta dalam mengambil bagian dalam mengatasi permasalahan keamanan yang timbul dalam komunitas masyarakat, baik radikalisme maupun terorisme, karena masyarakat merupakan komponen besar bangsa, yang apabila salah dalam menangani masalah di masyarakat maka akan berpengaruh terhadap integritas bangsa. Hal ini akan dapat dicapai bila ada kesepahaman antara masyarakat, TNI AD,



■ Babinsa Koramil 14/Purwodadi Melaksanakan Komsos Dengan Petani.

dan institusi terkait melalui forum komunikasi sosial;

**Kedua.** Berbagai permasalahan yang sering timbul ditengah-tengah pergolakan hidup masyarakat sekarang ini, telah memberi sinyal seakan-akan TNI AD yang memiliki tugas pokok pembinaan teritorial tidak berbuat sesuatu yang berarti bagi masyarakat. Padahal gelar satuan TNI AD dilakukan pada setiap tahun, baik oleh satuan komando kewilayahan maupun satuan non komando kewilayahan, seperti program TMMD, TNI Manunggal Reboisasi, TNI Manunggal KB-Kes,

dan penanggulangan bencana alam. Namun TNI AD kurang mendapat respons yang positif. Hal ini dapat dikatakan bahwa *center of gravity* keberhasilan pembinaan teritorial berupa “pengakuan masyarakat” belum terwujud dengan baik, dikarenakan belum berjalannya Komsos yang diinginkan, yakni TNI AD akan diakui oleh masyarakat, baik dikala hadir maupun ketika tidak ada ditengah-tengah masyarakat;

**Ketiga.** Kemampuan dan kelihaian yang dibentuk dari naluri, diperlukan dalam usaha untuk mencapai kesuksesan dari pola

pikir yang kreatif, panjang tetapi tidak bertele-tele dan berani menerima risiko atas keputusannya. Data menunjukkan bahwa Komsos yang dilakukan para prajurit di lapangan akhir-akhir ini saat bertugas, tidak menunjukkan sesuatu yang baik tetapi bertele-tele. Ketika dihadapkan pada suatu risiko, mereka tidak mampu mengambil risiko tersebut sehingga sebagian besar masyarakat menjadi kurang yakin terhadap keberadaan para prajurit di lapangan, terutama dalam menghadapi masalah radikal di sekitar tempat tugasnya. Efektivitas dalam berkomunikasi sosial menjadi kurang terlihat. Hal inilah yang mengakibatkan kita kalah dalam melaksanakan suatu komunikasi. Banyak prajurit kita yang hanya diam jika dihadapkan pada suatu masalah di lapangan. Selain itu juga disebabkan adanya ketentuan bahwa hanya pejabat tertentu yang boleh berbicara di depan umum;

**Keempat.** Prajurit kita masih memiliki karakter keras bahkan cenderung kasar jika berkomunikasi dengan masyarakat, karena mereka tidak disiapkan melalui latihan-latihan. Para prajurit masih menggunakan suatu pemaksaan dalam berkomunikasi “Pokoke/Pokoknya” atau “begini/begitu”, yang akhirnya terlihat secara jelas bahwa komunikasi sosial menjadi sesuatu yang kaku;

**Kelima.** Tidak sedikit orang yang menjadi lawan bicara prajurit di lapangan adalah orang-orang yang selalu berseberangan dengan kehadiran TNI AD. Dalam kondisi keterbukaan seperti sekarang ini, para ektrimis tersebut dapat secara frontal melakukan perlawanan berbicara atau minimal sebagai provokator sehingga membuat tidak berhasilnya Komsos TNI AD; dan

**Keenam.** Banyak Prajurit TNI AD terutama pada level unsur komandan yang bertindak sebagai kelompok konservatif, justru terkadang melemahkan upaya yang telah dilakukan oleh para prajuritnya sendiri, sementara apa yang akan dikomunikasikan itu merupakan bahan yang lebih dikuasai oleh unsur komandan sebagai pengembangan inovasinya.

## EKSISTENSI PRAJURIT DALAM INVESTASI KEPERCAYAAN MASYARAKAT DESA BINAAN TERKAIT DENGAN ISU RADIKALISME DAN TERORISME

INVESTASI kepercayaan pada era teknologi digital saat ini, kehadiran seorang figur sudah mulai mengalami distorsi dalam melakukan komunikasi sosial sehingga para prajurit yang akan berkomunikasi dengan masyarakat selalu berhadapan dengan berbagai masalah. Fakta-fakta yang terkait dengan hal tersebut adalah:

**Pertama.** Dihadapkan pada persoalan birokratis, para prajurit belum mampu berbuat apa-apa terhadap komunikasi sosial TNI AD yang diharapkan. Hal itu disebabkan oleh semua permasalahan yang timbul di wilayah saat ini selalu diselesaikan melalui aturan birokrasi yang panjang, baik ditinjau secara eksternal maupun internal dalam satuannya sendiri. Akibatnya, kemampuan komunikasi para prajurit di Kodim menjadi kaku sehingga sangat berpengaruh kepada keluwesan komunikasi sosial yang akan dilakukan dengan masyarakat sebagai penerima suatu pesan. Contohnya adalah penyelesaian terhadap munculnya atribut, kegiatan, dan *statement* organisasi yang telah dinyatakan terlarang seperti PKI, secara institusi di dalam TNI AD belum ada sikap yang sangat tegas;

**Kedua.** Dihadapkan pada formal lembaga, para prajurit tidak pernah dilatih untuk membiasakan diri menghadapi lembaga formal, sehingga saat melakukan komunikasi akan menjadi kaku. Akibatnya, para prajurit yang bertindak selaku komunikator tidak dapat berbuat apa-apa, sehingga sangat berpengaruh terhadap keberadaannya dihadapan masyarakat sebagai komunikan;

**Ketiga.** Dihadapkan pada prajurit sebagai panutan, kenyataan saat ini menunjukkan bahwa para prajurit mulai dianggap kurang mampu menjadi panutan dalam berkomunikasi, baik dilihat secara internal maupun eksternal di lingkungan sekitar tempat tugasnya. Jika sebelum reformasi, para prajurit mampu berdiri dan berbicara dengan



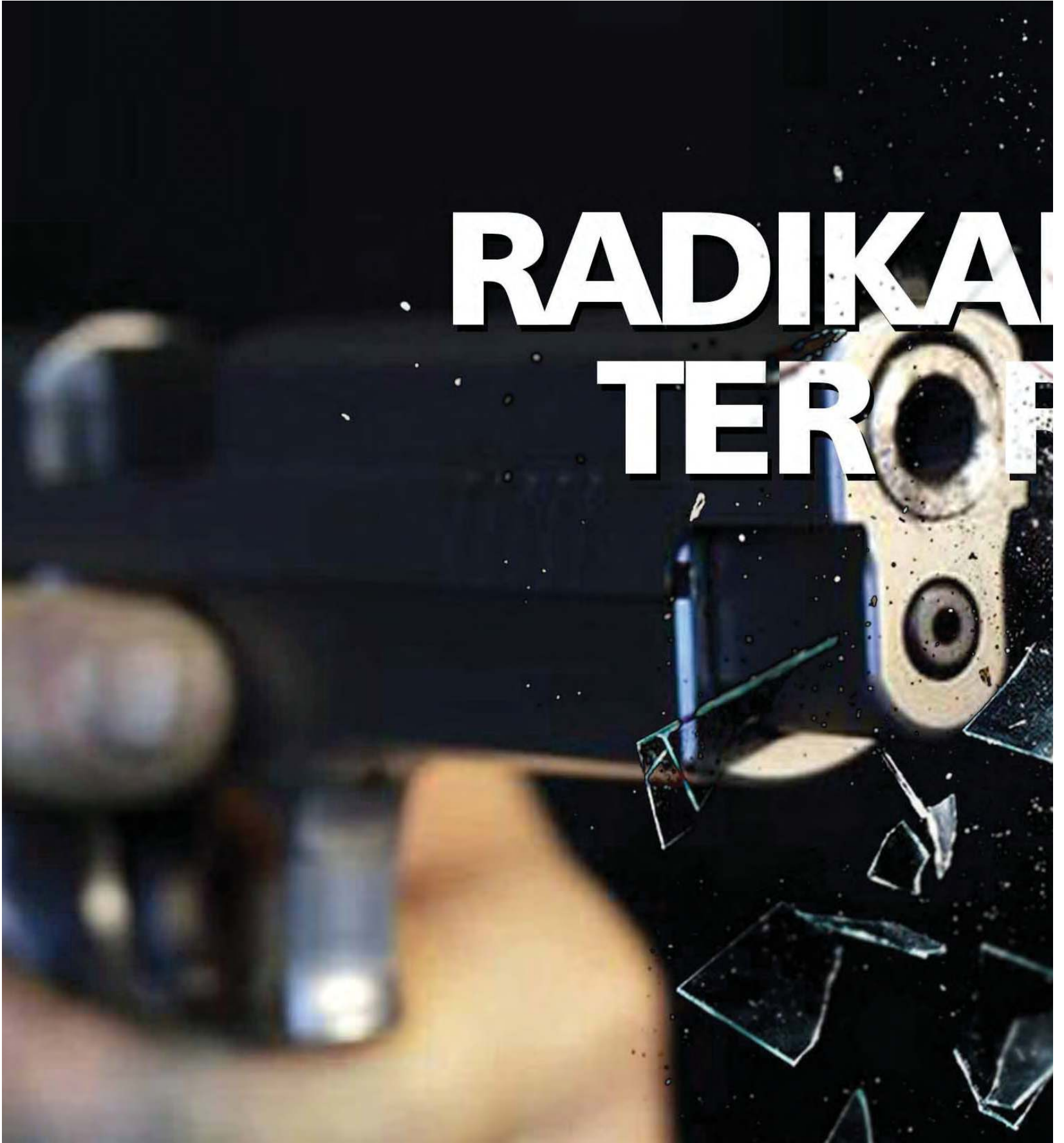
luwes di depan masyarakat tetapi pasca Orde Baru nampaknya masyarakat (komunikan) menjadi kurang *respons* terhadap apa yang disampaikan para prajurit (komunikator). Di sisi lain, figur prajurit yang akan dijadikan panutan sudah sangat kurang, walaupun ada, kurang menunjukkan kualitasnya dalam berbicara sebagai komunikator;

**Keempat.** Dihadapkan pada kemampuan sumber daya manusia, dapat diakui secara riil dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era sekarang ini, menunjukkan bahwa kualitas para prajurit selaku komunikator masih jauh dari harapan sehingga harus dioptimalkan; dan

**Kelima.** Dihadapkan pada media dan pesan yang akan disampaikan, secara tegas terlihat masih sangat kurang. Penyebabnya karena rata-rata para prajurit lemah di bidang inovasi karena sangat dipengaruhi oleh keberadaan kelompok konservatif, yang selalu melemahkan inovasi para prajurit disaat akan bertindak sebagai komunikator. Hal tersebut yang sangat memengaruhi keberadaan para prajurit kita dalam melaksanakan Komsos.

Harapan yang dapat mendorong tercapainya investasi kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi prajurit adalah adanya keselarasan keinginan pemerintah bahwa sinergitas

■ Pelajar membenteng spanduk tolak radikalisme dan terorisme saat Deklarasi dan Komitmen Bersama Menolak Radikalisme dan Terorisme





# ALISME & RISME

pembangunan harus mencakup seluruh aspek, dengan mengedepankan penyelesaian berbagai perbedaan dalam perdamaian yang permanen dalam bingkai NKRI. (Jokowi, 2014). Sedangkan secara internal, di dalam tubuh TNI AD telah memiliki modal investasi kepercayaan yang bersumber dari Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI, yang apabila diperdalam merupakan modal yang sangat masyhur untuk menarik kepercayaan dari masyarakat yang sedang terjebak dalam arena teknologi digital dan global sekarang ini. Namun di sisi lain, kita harus menyadari sepenuhnya bahwa di lingkungan internal prajurit, rasa nasionalisme mulai menurun dari beberapa oknum yang selalu menghembuskan rasa tidak percaya kepada TNI AD, dengan selalu mengurai cerita-cerita lama yang sebetulnya sarat dengan kepentingan politik. Mereka lebih gemar menempatkan modal hasutan mereka untuk mendapatkan keuntungan, dengan memengaruhi warga masyarakat yang nota bene tidak tahu apa-apa.

Komsos yang dibangun oleh TNI AD harus dapat berjalan secara relevan dengan teori-teori komunikasi, sebagai berikut:

**Kesatu.** Komunikasi adalah suatu proses di mana suatu sistem dibentuk, dipelihara, dan diubah dengan tujuan bahwa sinyal-sinyal yang dikirimkan

dan diterima dilakukan sesuai dengan aturan (Forsdale :1981);

**Kedua.** Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial, setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang bersifat menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. Melalui komunikasi, kita bekerja sama dengan anggota masyarakat (keluarga, kelompok belajar, perguruan tinggi, RT, RW, desa, kota, dan negara secara keseluruhan) (Deddy Mulyana, ilmu komunikasi, 2012);

**Ketiga.** Komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam (Cangara 2004:19);

**Keempat.** Salah satu teori komunikasi massa yang pertama dan paling terkenal adalah Harold Lasswell. Dalam artikel klasiknya tahun 1948 ia mengemukakan, model komunikasi yang sederhana dan sering dikutip banyak orang yakni “siapa (*who*), berbicara apa (*says what*), dalam saluran yang mana (*in which channel*), kepada siapa (*to whom*) dan pengaruh seperti apa (*what that effect*) (Littlejohn, 1996).

Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh komandan Kodim berkaitan dengan investasi kepercayaan adalah melihat kembali sejarah, betapa hebatnya para tokoh TNI AD banyak menjadi panutan masyarakat sehingga lebih mengentalkan kemandirian TNI-Rakyat. Para tokoh tersebut betul-betul diterima oleh masyarakat, seperti Jenderal Besar TNI AH. Nasution dan Jenderal TNI M. Yusuf, yang bersama prajurit-prajuritnya “hadir, menjadi teladan, dan memberi semangat rela berkorban” di tengah-tengah kesulitan bangsa yang dialami saat itu. Adapun kondisi saat ini sudah mulai mengalami distorsi, yang meskipun hanya dilakukan oleh oknum namun memberi dampak kurang menguntungkan bagi kehadiran TNI AD dalam melaksanakan Komsos. Sebagai contoh adalah apa yang dilakukan oleh salah



■ Warga desa menolak jenazah seseorang yang menjadi teroris akibat menganut paham radikal.

satu purnawirawan TNI AD, yang memberikan ruang bagi tumbuhnya gerakan paham komunis di Indonesia. Akibat pernyataannya, kepercayaan masyarakat terhadap TNI AD menjadi gamang dan prajurit di lapangan menjadi ragu-ragu dalam bertindak.

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan eksistensi prajurit melalui komunikasi dengan masyarakat di desa binaannya adalah:

**Pertama.** Untuk mendapatkan eksistensi prajurit sehingga timbul kepercayaan masyarakat desa binaan, dikaitkan pada persoalan birokratis akhir-akhir ini, yang menjadikan kekurangberdayaan para prajurit dalam membiasakan diri melaksanakan Komsos, maka upaya yang dilakukan adalah para unsur komandan adalah melatih personel di satuannya agar mampu bertindak sebagai komunikator yang baik dihadapan masyarakat, dengan pelajaran berbicara efektif. Walaupun pelajaran berbicara efektif tersebut terlihat belum

diajarkan di satuan, namun dengan bekal kemampuan para komandan Kodim yang telah memperoleh bekal pelajaran berbicara efektif dalam pendidikan Seskoad, hal tersebut tidak sulit untuk dilaksanakan. Pelajaran berbicara efektif itulah yang dapat disosialisasikan kepada seluruh anggotanya di Kodim, agar dapat dijadikan sebagai sarana melatih diri dalam berbicara efektif dan mengimplementasikannya saat mereka bertindak sebagai komunikator. Adapun terkait dengan kemampuan materi yang akan disampaikan, khususnya tentang paham radikal, dapat diberikan panduan tentang ringkasan sejarah singkat tahun 1965 sehingga pengetahuan prajurit dapat ditingkatkan;

**Kedua.** Dalam mengoptimalkan kemampuan prajurit sehingga terjaga eksistensinya dihadapan persoalan formal lembaga. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah para komandan mendidik dan melatih para personel satuannya agar membiasakan diri dalam menghadapi arena komunikasi



sosial yang melibatkan orang banyak, baik pada lembaga-lembaga resmi maupun tidak resmi, baik pada saat situasi formal maupun non formal. Mendorong para prajurit untuk mengambil peran aktif dengan sering mendatangi wilayah yang menjadi sektor binaannya, dapat memangkas kecanggungan prajurit saat memasukkan isu tentang radikalisme dalam berkomunikasi dengan masyarakat;

**Ketiga.** Untuk mengoptimalkan tingkat kepercayaan masyarakat sehingga tertanam investasi kepercayaan masyarakat desa binaan, dihadapkan pada pengaruh pola komunikasi sosial pada persoalan sebagai prajurit panutan. Dalam hal ini adalah komunikasi antara orang yang bertindak sebagai pembicara atau pemberi pesan yang dikenal dengan sebutan komunikator kepada orang lain yang akan menerima pesannya yang disebut komunikan. Sesuai teori dalam ilmu komunikasi, komunikator (*communicator*) bisa juga bertukar peran sebagai komunikan atau penerima pesan sehingga komunikator yang baik juga harus berusaha menjadi komunikan yang baik. Seorang sumber bisa menjadi pembicara, sebaliknya pembicara

tidak selalu sebagai sumber. Bisa jadi, ia menjadi pelaksana (eksekutor) dari seorang sumber untuk menyampaikan sesuatu. Terkait itu, para komandan dapat berupaya untuk meningkatkan kemampuan prajuritnya dalam penyiapan dirinya sebagai pembicara. Hal tersebut dapat dilatihkan di dalam lingkungan satuannya atau pada lembaga formal lainnya;

**Keempat.** Untuk mengoptimalkan kemampuan prajurit sehingga dapat eksis dihadapkan pada persoalan untuk meningkatkan kemampuan SDM maka setiap komandan Kodim dapat berupaya untuk mendidik dan melatih prajuritnya dalam rangka penyiapan diri sebagai seorang pembicara (komunikator); dan

**Kelima.** Untuk menjaga agar eksistensi prajurit harus selalu terjaga dihadapkan pada pengaruh persoalan media dan pesan yang akan disampaikan. Untuk menjadi seorang komunikator yang baik, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami, yakni setiap prajurit sebagai seorang komunikator

perlu dilatih untuk menyusun dengan baik isi pesan yang akan disampaikan, sehingga pesan tersebut mudah dimengerti oleh masyarakat. Sebagai seorang komunikator yang baik, seorang prajurit di lapangan juga harus mengetahui media mana yang paling tepat untuk mengirimkan pesan kepada masyarakat dan harus tahu bagaimana cara mengantisipasi gangguan yang kemungkinan akan muncul pada proses pengiriman pesan. Selain itu, komunikator yang baik akan bertanggung jawab memberikan tanggapan terhadap umpan balik (*feedback*) yang disampaikan oleh masyarakat selaku pihak penerima (*receiver*).

Melalui komunikasi sosial TNI AD, maka inovasi-inovasi dapat diakomodir oleh pihak-pihak terkait yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial, baik itu kelompok masyarakat, organisasi, institusi pemerintah, maupun institusi lain yang dapat mengambil bagian dalam mengatasi setiap permasalahan sosial di masyarakat sehingga kedepannya akan terwujud keamanan dan kenyamanan bersama. Dalam hal ini, TNI AD mempunyai tugas dalam pemberdayaan wilayah untuk membantu pemerintah dalam pendayagunaan segala potensi yang terkandung dalam wilayah geografis, sosiologis, dan geografis teritorial, serta demografinya untuk menghasilkan output yang maksimal guna kepentingan seluruh masyarakat dan negara Indonesia, sekaligus untuk mencegah sedini mungkin kejadian-kejadian pertikaian antar desa. Pemberdayaan wilayah ini tidak lepas kaitannya dengan proses interaksi yang dilaksanakan oleh TNI AD terhadap komponen masyarakat, yang tujuan utamanya adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak pada ketahanan wilayah dimana komunitas suatu masyarakat berada. Secara sederhana dapat diartikan, permasalahan sosial yang timbul harus dapat ditanggapi oleh sistem sosial termasuk di dalamnya adalah TNI AD.

## MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH

Mengalir dari pembahasan di atas, sampailah pada kesimpulan bahwa optimalisasi Komsos (komunikasi sosial) prajurit Kodim (komando distrik militer) dalam rangka menangkal berkembangnya paham radikal, dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

**Pertama.** Komandan satuan akan terus mendorong seluruh prajurit di jajarannya untuk menyadari bahwa komunikasi sosial adalah keharusan dan kebutuhan setiap insan manusia. Artinya, sebagai makhluk sosial, seorang prajurit pasti membutuhkan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini merupakan suatu hakekat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesamanya, yang dalam kehidupannya, manusia sering dipertemukan satu sama lainnya dalam suatu wadah, baik formal maupun non formal;



## Letnan Kolonel Kav Kristiyanto, S.Sos.

Alumni Akmil 1999, yang mulai meniti karier di satuan Yonkav 10/Serbu sebagai Danton 3 Kibu 103 lalu menjadi Danton 2 Kibu 102, Pasi 1/Intel, dan Dankibu 102. Selanjutnya menjabat sebagai Kasipam Bagpamops Set Pussenkav, Wadanyonkav 4/Tank, Kabagpamops Set Pussenkav, dan saat ini menjabat sebagai Danyonkav 2/Tank, Kasiintelrem 074/WRT, dan saat ini menjadi Dandim 0712/Tegal Korem 071/Wijayakusuma.

Pendidikan militer terakhir Seskoad tahun 2013, sedangkan pendidikan pengembangan umum yang pernah diikuti: Sussar Para (1998), Susarcabkav (2000), Combat Intel (2000), Kibi (2000), Suspa Intelpur (2004), Tar Litpers (2004), Suspa Intel Pus/Prop (2006), Sus Dankikav (2007), Selapakav (2009), dan Susdanyon MK (2014), serta Pembekalan Dandim (2016). Tugas operasi yang pernah dijalani adalah Ops Pam Poso (2001, 2005), dan Ops Pam Maluku (2004).

**Kedua.** Komsos dapat memelihara motivasi, dengan memberikan penjelasan kepada para prajurit bawahan apabila di lingkungan ataupun wilayah binaannya terdapat paham radikal, baik yang berafiliasi dengan kelompok kiri seperti eks pelaku penghianatan G30S PKI 1965 maupun tentang keberadaan terorisme yang mengarah kepada Jemaah Islamiah (JI) bahkan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) sehingga prajurit lebih memahami tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka mengelola permasalahan, dan apa yang dapat dilakukan untuk mencegah berkembangnya paham radikal tersebut;

**Ketiga.** Di antara kedua belah pihak harus ada *two-way-communications* atau komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik. Untuk itu, diperlukan adanya kerja sama antara prajurit TNI AD (baik sebagai komunikator atau komunikan) yang diharapkan dapat mendukung tercapainya tugas pokok institusi TNI AD. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pembelajaran dan pelatihan di satuan sebelum prajurit turun ke wilayah binaannya;

**Keempat.** Komsos merupakan proses interaksi yang berlangsung secara tatap muka. Dalam proses komunikasi ini akan terbentuk sebuah atraksi sosial, di mana individu mencoba memprediksi sesuatu yang akan terjadi. Apapun perkembangan lingkungan masyarakat yang terkait dengan radikalisme, harus mendapatkan porsi yang lebih besar untuk mendapatkan *feed back* dari prajurit dan satuan;

**Kelima.** Sikap sportif merupakan proses mengurangi sikap defensif dalam komunikasi. Sikap defensif akan terjadi saat individu merasa bahwa dirinya tidak dapat menerima atau bahkan saat melakukan kebohongan dan tidak jujur. Untuk

mengurai permasalahan prajurit tersebut, seorang komandan Kodim dapat memberikan referensi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai organisasi radikal yang ada di wilayah binaan setiap satuan sehingga prajurit dalam berkomunikasi sosial tidak lagi bersikap defensif; dan

**Keenam.** Sikap terbuka prajurit dan satuan yang dipelopori oleh komandan Kodim, sangat berpengaruh dalam membentuk Komsos yang efektif. Sikap ini akan mengurangi perasaan curiga atau sikap tidak percaya terhadap individu lain atau masyarakat, saat berlangsungnya komunikasi sosial.

Untuk mencapai hasil optimal, yang dapat dilakukan melalui komunikasi sosial prajurit Kodim dalam menangkal paham radikal, dihadapkan pada pola komunikasi sosial, eksistensi prajurit, dan investasi kepercayaan masyarakat, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

**Pertama.** Guna mendapatkan investasi kepercayaan masyarakat di masa yang akan datang, diharapkan Komando Atas perlu menyiapkan personel untuk dijadikan sebagai *invest figure* dalam Komsos;

**Kedua.** Satpur dan Banpur selaku pencetak kader-kader teritorial yang selanjutnya akan menjalankan tugasnya di komando kewilayahan, agar dibuatkan buku panduan dalam menciptakan kader Komsos yang lihai dan andal untuk menghadapi persoalan masyarakat yang terkait radikalisme; dan

**Ketiga.** Guna mendapatkan suatu komunikasi sosial yang baik, semua satuan jajaran TNI AD harus menyiapkan personelnnya dengan bahan pembicaraan yang inovatif dan kreatif, yang diasah melalui kurikulum pendidikan pengembangan umum maupun pendidikan pengembangan spesialisasi dalam lembaga pendidikan.

# **PENGUATAN COMMUNITY DEVELOPMENT (COMDEV)**

— Untuk Cegah —

## **RADIKALISME DAN TERORISME**

Tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat, bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat, tentara tidak lain dan tidak lebih dari salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban.

(Panglima Besar Jenderal Soedirman)



**Dalam kaitannya dengan pemberantasan radikalisme dan terorisme melalui *comdev*, pendekatan yang digunakan adalah pada aspek kedamaian dan anti kekerasan (*peace and non-violence*) dengan pemberdayaan (*empowerment*). Kedamaian dapat dipahami secara sederhana, sebagai suatu keadaan dimana tidak ada perasaan tertekan, terpaksa, dan konflik.**

## SEJARAH PANJANG

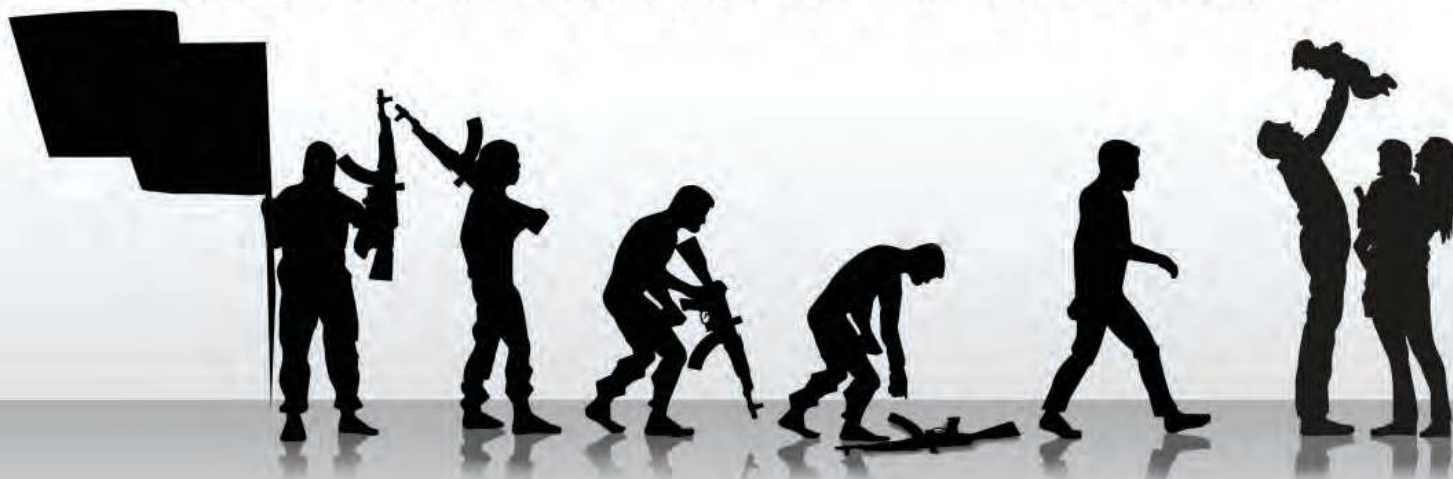
Sejarah terorisme di Indonesia dimulai tidak lama setelah Republik ini merdeka. Di antaranya adalah usaha teror dan pembunuhan terhadap presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno, antara lain peristiwa pelemparan granat di Cikini (1957) yang mengakibatkan 100 orang terluka termasuk pengawal presiden, pencegahan di Rajamandala (1960) oleh DI/TII terhadap Ir. Soekarno dan Presiden Uni Soviet Nikita Krushchev, pelemparan granat di Makassar (1960), dan lain sebagainya. Pada masa orde baru, kegiatan teror ini kembali terjadi dalam bentuk pembajakan pesawat Garuda Indonesia DC-9 Woyla di Bandara Don Mueang, Bangkok Thailand (1981) dan bom di Candi Borobudur (1985). Pada masa reformasi, aktivitas terorisme di Indonesia semakin menjadi-jadi. Diawali dengan bom Kedubes Philipina (1 Agustus 2000), lalu muncul serangkaian peristiwa terorisme lainnya hingga terjadinya sebuah peristiwa yang mengguncang dunia yaitu bom Bali-I pada 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 jiwa dan 300 orang terluka.

Karena sebagian besar pelaku kegiatan terorisme di Indonesia adalah kelompok radikal (kanan) maka seolah-olah kedua tindakan ini (radikalisme dan terorisme) tidak dapat dipisahkan, padahal sesungguhnya kedua hal ini berbeda. Pemerintah telah berupaya mengurangi dan menghilangkan aksi radikalisme dan terorisme di Indonesia namun belum dapat berhasil dengan sempurna, terbukti masih ada aksi teror, sebagaimana peristiwa bom Sarinah di awal 2016 lalu. Kesulitan pemberantasan terorisme ini disebabkan karena sangat meleburnya pelaku radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat, bahkan lingkungan sekitar pelaku tidak mengenali kegiatan radikalisme dan terorisme yang dilakukan.

TNI AD sebagai salah satu unsur pertahanan dan keamanan negara memiliki sejarah yang panjang dalam mewarnai perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah telah membuktikan, kemerdekaan Indonesia diraih dengan perjuangan dan bukan karena pemberian. Perjuangan yang dilakukan melalui perpaduan yang erat dan saling bahu-membahu antara militer dengan rakyat. Kemanunggalan TNI-Rakyat ini sampai saat ini terus dipelihara sebagai salah satu inti kekuatan bangsa Indonesia. TNI AD dengan komando kewilayahan (Kowil) yang berada di seluruh pelosok, memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan teritorial dengan melaksanakan metode komunikasi sosial, bhakti TNI dan pembinaan perlawanan wilayah (Binwanwil). Kemanunggalan ini tetap terjaga karena senantiasa dibina oleh Babinsa sebagai ujung tombak fungsi teritorial, yang dikoordinir oleh Koramil dan Kodim.

Menurut sensus penduduk tahun 2010, di seluruh Indonesia terdapat 1.331 kelompok suku, dan jumlah ini pada sensus 2013 diperbaharui menjadi 633 kelompok suku besar. Pengelompokan menurut suku bangsa ini merupakan salah satu cara pengelompokan sosial masyarakat Indonesia. Menurut

# DERADIKALISASI



Robert Bierstedt, seorang sosiolog berkebangsaan Amerika Serikat, kelompok sosial dapat dikelompokkan menjadi empat macam yaitu kelompok statistik, kelompok kemasyarakatan, kelompok sosial, dan kelompok asosiasi. Dengan luas wilayah 1,9 juta km<sup>2</sup>, penduduk 255 juta jiwa, lebih dari 17 ribu pulau, tiga zona waktu, dan berbagai keanekaragaman lainnya maka dapat dibayangkan berapa jumlah komunitas yang ada di Indonesia. Kegiatan komunitas ini ada yang bersifat positif dan ada yang negatif, bahkan ada yang mengarah kepada kegiatan radikalisme dan terorisme. Dengan demikian dapat dirumuskan permasalahan yang ada adalah “Bagaimana pencegahan terorisme dan radikalisme di tingkat Kodim, dengan menggunakan pemberdayaan *community development* yang dapat dilakukan oleh aparat teritorial sebagai ujung tombak kemanunggalan TNI-Rakyat?”

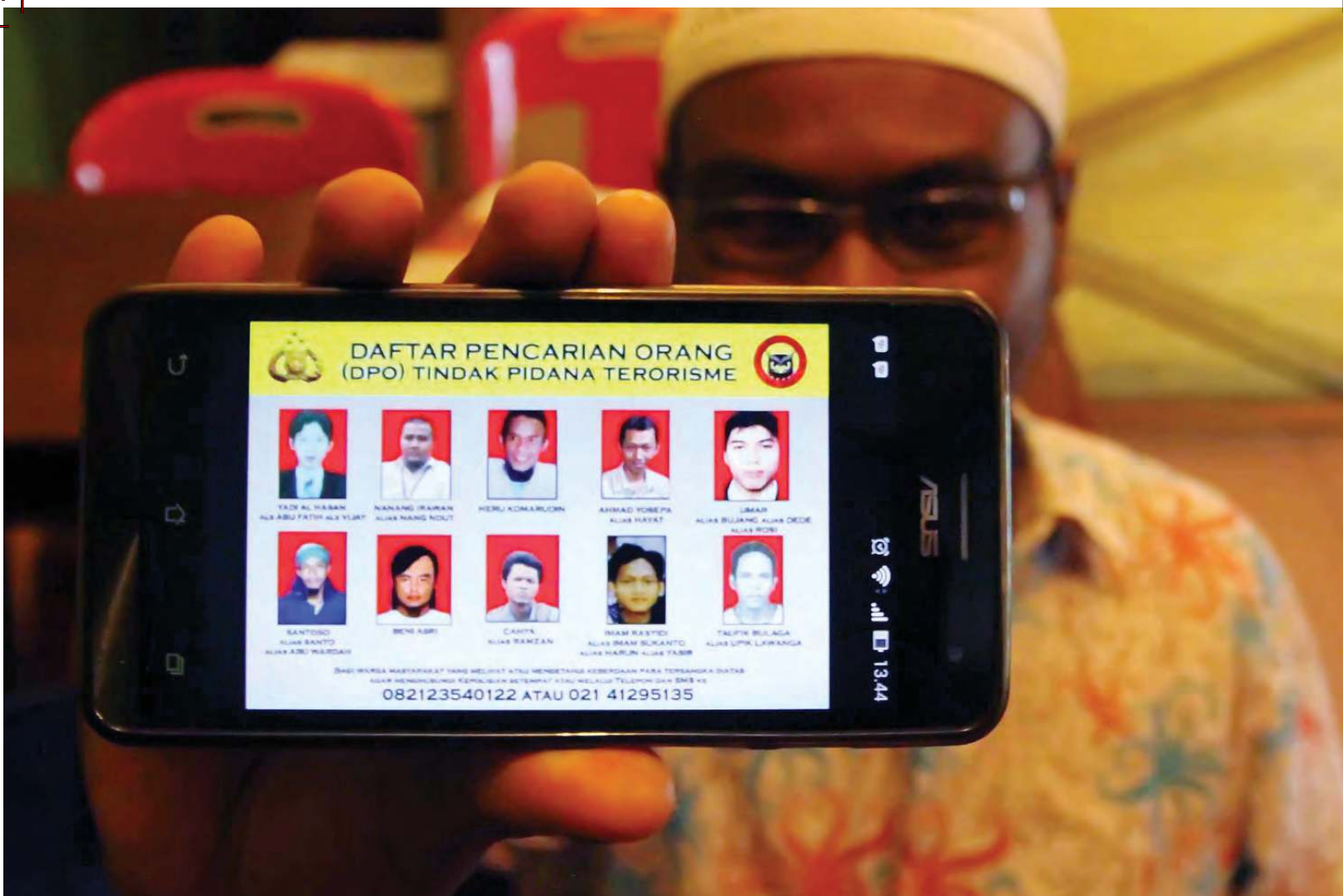
## MEMAHAMI MAKNA COMDEV

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), radikalisme dapat diartikan sebagai paham atau aliran yang radikal dalam politik; paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; dan sikap ekstrem dalam aliran politik. Menurut Horace M Kallen, seorang filsuf berkebangsaan Amerika Serikat, radikalisme ditandai oleh tiga kecenderungan umum. **Kesatu**, radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga, atau nilai-nilai yang dapat bertanggung jawab terhadap keberlangsungan keadaan yang ditolak. **Kedua**, radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan. Ciri ini menunjukkan bahwa di dalam radikalisme terkandung suatu program atau pandangan dunia (*world view*) tersendiri. Kaum radikal berusaha kuat untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai ganti dari tatanan yang

sudah ada. **Ketiga**, kaum radikal memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Dalam gerakan sosial, kaum radikal memperjuangkan keyakinan yang mereka anggap benar dengan sikap emosional yang menjurus pada kekerasan.

Terorisme menurut KBBI ini diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan teror. Menurut *Black's Law Dictionary*, terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana (Amerika atau negara bagian Amerika), yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, memengaruhi kebijakan pemerintah dan memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan. Muladi, mantan Gubernur Lemhannas memberi catatan atas definisi ini, bahwa hakekat perbuatan terorisme mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter politik. Bentuk perbuatan bisa berupa perompakan, pembajakan maupun penyanderaan. Pelaku dapat merupakan individu, kelompok, atau negara. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah munculnya rasa takut, pemerasan, perubahan radikal politik, tuntutan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar untuk pihak yang tidak bersalah serta kepuasan tuntutan politik lain. Menurut *Webster's New World College Dictionary* (1996), definisi terorisme adalah “*the use of force or threats to demoralize, intimidate, and subjugate*” yang artinya penggunaan kekuatan atau ancaman untuk mengacaukan, mengintimidasi, dan menundukkan. Doktrin membedakan terorisme ke dalam dua macam definisi, yaitu definisi tindakan teroris (*terrorism act*) dan pelaku terorisme (*terrorism actor*). Disepakati oleh kebanyakan ahli bahwa tindakan yang tergolong kedalam tindakan terorisme adalah tindakan-tindakan yang memiliki elemen kekerasan, tujuan politik, dan teror / *intended audience*.

PBB mendefinisikan *community development* (*Comdev*)



■ Penyebaran Foto DPO Teroris.

sebagai “suatu proses di mana anggota masyarakat datang bersama-sama untuk mengambil tindakan kolektif dan menghasilkan solusi untuk masalah umum.” Ini adalah istilah yang luas, diberikan pada praktik pemimpin sipil, aktivis, warga terlibat, dan profesional untuk meningkatkan berbagai aspek masyarakat, biasanya bertujuan untuk membangun masyarakat lokal lebih kuat dan lebih tangguh.

Sebuah komunitas dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang tidak hanya hidup di daerah yang sama tetapi juga berbagi minat yang sama, pengalaman, dan sering berkaitan dengan daerah di mana mereka tinggal. Seringkali ketika orang telah tinggal di daerah yang sama untuk sementara waktu mereka menjadi akrab satu sama lain dan memiliki ketertarikan tersendiri. Anak-anak bersekolah di sekolah yang sama, tumbuh bersama,

berbagi pengalaman yang serupa. Dalam beberapa situasi, orang dewasa juga bekerja bersama-sama dan semua anggota komunitas akan berbagi fasilitas yang sama seperti rumah sakit, sarana hiburan pelayanan masyarakat, dan fasilitas umum lainnya.

Definisi di atas menekankan bahwa pembangunan masyarakat merupakan suatu “proses”, dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat didalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan mereka agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional.

Karena paham radikalisme dan terorisme seringkali berkembang di

tengah-tengah masyarakat maka penulis berpikir bahwa cara yang paling tepat untuk menghambat perkembangan dan memutus mata rantai radikalisme dan terorisme adalah dengan memperkuat komunitas yang ada dengan faham anti radikalisme dan terorisme. Salah satu unsur pemerintah yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dan dapat menjangkau semua komunitas adalah TNI AD, melalui aparat teritorialnya, sehingga upaya untuk melakukan *Comdev* dapat dilakukan secara optimal oleh aparat kewilayahan dengan ujung tombak Babinsa, yang dikoordinir oleh Koramil dan Kodim.

Upaya *Comdev* sebenarnya telah lama dilakukan oleh pemerintah. Tetapi kenyataan menunjukkan, banyak pihak yang sesungguhnya belum cukup memahami makna *Comdev* itu sendiri, falsafahnya, prinsip-prinsipnya, dan berbagai aspek terkait lainnya. Seringkali



## “Upaya *Comdev* sebenarnya telah lama dilakukan oleh pemerintah. Tetapi banyak pihak yang sesungguhnya belum cukup memahami makna *Comdev* itu sendiri”

pengertian atas berbagai istilah yang terkait dengan pengembangan komunitas itu, dipahami sama atau bahkan dicampur-adukkan satu sama lain. Karena itu, sebelum mampu melakukan pengembangan komunitas dengan baik, penting bagi kita untuk memahami beberapa istilah dasar yang berkaitan dengan itu.

Masyarakat adalah sekumpulan makhluk sejenis sedangkan komunitas adalah sekumpulan makhluk sejenis yang memiliki ciri-ciri yang relatif sama (seragam). Masyarakat Indonesia jika dipandang dari berbagai agama yang dianut, dapat disebut terdiri dari berbagai komunitas, misalnya: Komunitas Islam, Kristen, Hindu, dan sebagainya. Sering juga orang menggunakan istilah masyarakat untuk menunjuk pada suatu komunitas dan memang tidak terlalu salah; dalam hal demikian maka dapat disebut bahwa masyarakat Islam Indonesia, misalnya terdiri dari berbagai komunitas, yaitu: komunitas Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Wahidiyah, dan sebagainya.

Ciri-ciri yang relatif sama dapat ditentukan atas berbagai aspek sehingga cakupan suatu masyarakat maupun cakupan suatu komunitas dapat digeser, mulai dari yang sangat umum sampai yang sangat spesifik. Inilah yang mengakibatkan campur-aduknya pengertian kedua istilah tersebut sering terjadi. Yang pasti, bahwa istilah komunitas selalu menunjuk pada sekelompok anggota masyarakat, yang memiliki ciri-ciri relatif sama. Ciri-ciri tersebut lebih spesifik dari pada ciri-ciri anggota masyarakat. Komunitas selalu merupakan bagian yang lebih kecil dari suatu masyarakat.

Contoh lain menunjuk pada masyarakat Jakarta, yang dapat terdiri dari beberapa komunitas penduduk, yang relatif sama berdasarkan kelurahan tempat tinggal, misalnya: komunitas etnis Betawi, Batak, dan sebagainya. Untuk tujuan dan konteks bahasan yang akan diuraikan dalam tulisan ini, dipilih penggunaan istilah ‘komunitas’ karena selain mengambil terjemahan langsung dari istilah ‘*community*’, juga dengan alasan bahwa komunitas menunjuk kepada suatu bagian dari masyarakat yang relatif lebih spesifik. Karena itu, dalam tulisan ini digunakan istilah ‘pengembangan komunitas’ sebagai terjemahan langsung dari istilah ‘*community development*’.

## MENGAPA COMMUNITY DEVELOPMENT MENJADI PENTING?

Dorongan kuat yang menyebabkan perlunya *comdev* adalah kegagalan negara-negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat (*welfare state*). Merujuk pada Mukadimah UUD 1945, dapat ditegaskan bahwa Republik Indonesia adalah negara yang harus mewujudkan *welfare state* sebagai tujuan (pembukaan



UUD 1945 alinea 4). Tidak hanya di Indonesia, sejak lama sebenarnya telah terbukti bahwa negara-negara *welfare state* telah gagal mengupayakan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial (*social justice*) bagi rakyatnya. Di Indonesia, puncak kegagalan tersebut nampak menjadi sangat dirasakan bersamaan dengan mulainya masa krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997-1998. Kesenjangan perolehan pendapatan, meningkatnya jumlah penduduk miskin, dan pertumbuhan jumlah pengangguran angkatan kerja produktif adalah beberapa diantara indikator yang dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa keberhasilan masih cukup lama tercapai.

Dapat kita tanyakan ke diri kita masing-masing, benarkah dinas kebersihan sudah ‘profesional’ mengurus sampah kota dengan menggunakan uang pajak dan retribusi yang dibayar oleh masyarakat? Benarkah dinas sosial, pemerintah daerah dan kementerian sosial sudah profesional mengurus yatim piatu, kaum jompo, tuna grahita, dan anggota masyarakat miskin? benarkah dinas Penerangan, humas-humas pemerintah, Kemenkominfo,

dan Kemendikbud sudah profesional menyediakan informasi dan mengurus pendidikan - mencerdaskan kehidupan bangsa?

Uraian dan jawaban-jawaban tidak memuaskan di atas membuktikan, begitu banyak kebutuhan insani yang tidak dapat dipenuhi dengan model pelayanan sentralistik yang bertumpu pada negara, pola industrial kapitalistik, dan mekanisme pasar. Karena itu, suatu pendekatan lain dalam pemenuhan kebutuhan akan layanan insani (*human services*) sangat diperlukan. Pendekatan itu adalah pelayanan yang bertumpu pada komunitas (*community-based services*).

Pemenuhan kebutuhan pelayanan insani yang bertumpu pada komunitas, tidak mungkin dilakukan oleh struktur negara, industrial kapitalistik, dan pasar sehingga dibutuhkan struktur komunitas yang sesuai. Untuk membangun struktur komunitas yang sesuai itulah, upaya *comdev* sangat penting dan diperlukan.

Terdapat dua sudut pandang utama terhadap *comdev*, yaitu: sudut pandang ekologis (*ecological*) dan sudut pandang keadilan sosial (*social justice*). Dari sudut pandang ekologis, kebutuhan akan *comdev* adalah akibat dari ketidakmampuan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya, industrial kapitalistik, dan pasar dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan diyakini hanya dapat diselenggarakan dengan

mengikuti prinsip-prinsip ekologi. Disamping itu tidak dapat disangkal bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat juga merupakan salah satu kebutuhan insani yang sangat hakiki.

Dari sudut pandang keadilan sosial, pembangunan yang tidak berkelanjutan nampaknya juga dapat menimbulkan ketidakadilan sosial. Kota Jakarta misalnya, membangun jalan sampai bertingkat tiga untuk mengatasi persoalan kemacetan lalu-lintas. Bahkan seluruh pulau Jawa melakukan upaya-upaya senada dalam memenuhi berbagai kebutuhan prasarana dan sarananya. Semua itu tentu saja dilakukan atas beban biaya material dan biaya sosial yang ditanggung oleh luar Jawa. Itulah sebabnya perasaan ketidakadilan sosial diungkapkan oleh orang Kalimantan dan Papua dengan mengatakan "Di Jakarta tidak ada sungai tetapi jembatan dibangun bahkan sampai bertingkat tiga. Sementara di Kalimantan dan di Papua banyak sungai tetapi sangat sedikit jembatan yang dibangun".

Sudut pandang keadilan sosial secara khusus mempersoalkan enam aspek penting yaitu ketidakberuntungan atau ketidakberdayaan struktural (*structural disadvantage*), kebutuhan (*needs*), hak (*rights*), kedamaian dan anti kekerasan (*peace and non-violence*), demokrasi partisipatif (*participatory democracy*), dan pemberdayaan (*empowerment*).



**"Di Jakarta tidak ada sungai tetapi jembatan dibangun bahkan sampai bertingkat tiga. Sementara di Kalimantan dan di Papua banyak sungai tetapi sangat sedikit jembatan yang dibangun"**

# SEMINAR KALISIASI PESANTREN

Pesantren dalam Radikalisme Agama di Indonesia

TORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTEN

Hotel Grand Dia  
18-20 Agus



Dalam kaitannya dengan memberantas radikalisme dan terorisme melalui *comdev*, pendekatan yang digunakan adalah pada aspek kedamaian dan anti kekerasan (*peace and non-violence*) dengan pemberdayaan (*empowerment*). Kedamaian dapat dipahami secara sederhana sebagai suatu keadaan dimana tidak ada perasaan tertekan, terpaksa, dan konflik. Di sini tidak hanya kekerasan fisik dan kekerasan emosional yang dilakukan oleh individu tetapi termasuk juga

'kekerasan yang melembaga', seperti diskriminasi berbasis kebangsaan, ras/etnis, gender, dan agama. Hambatan terbesar dalam mewujudkan kedamaian dan anti kekerasan adalah pola-pola persaingan yang telah melembaga di masyarakat modern (khususnya di perkotaan). Oleh karenanya, pekerjaan pengembangan komunitas sangat memerlukan keterampilan mengelola konflik.

Terdapat lima kecenderungan setiap orang dalam

menangani konflik, yaitu:

1. **Penolakan** (konflik menyebabkan tidak nyaman).
2. **Kompetisi** (konflik memunculkan pemenang).
3. **Kompromi** (ada kompromi dan negosiasi dalam konflik untuk meminimalisasi kerugian).
4. **Akomodasi** (ada pengorbanan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungan).
5. **Kolaborasi** (mementingkan dukungan & kesadaran pihak lain untuk bekerja bersama-sama).

Pada diskusi antara tokoh NU, BNPT dan Densus 88 pada tanggal 11 Maret 2015 terdapat tiga kesimpulan untuk mencegah tindakan radikalisme dan terorisme yaitu:

**Pertama; Deradikalisasi (soft approach)**

Yaitu memberi pengertian dan menyebarluaskan ajaran Islam yang sebenarnya. Penyimpangan pemikiran kalangan teroris dan radikalisme dalam memaknai teks-teks Al-Qur'an dan Al-Hadist, harus diimbangi dengan harkah pemikiran sesuai dengan tafsir yang sejalan dengan nilai-nilai

luhur ajaran Agama Islam. Ideologi dan teologi kekerasan harus dilawan dengan ideologi dan theologi yang cinta damai, termasuk pemikiran yang ingin mendirikan Daulah Islamiyah di Negara RI dengan sistem Khilafah Islamiyah, harus diluruskan dengan pemikiran Al-Wasathiyah Al-Islamiyyah wa Madzharuha fi Daulati Pancasila (Islam Tawassuth dan manifestasinya dalam Negara Pancasila, termasuk penjelasan yang termaktub dalam Pancasila dan UUD RI).

**Kedua; Penindakan (hard approach)**

Artinya harus ada ketegasan dari pihak pemerintah untuk menindak kelompok-kelompok teroris dan radikalisme, termasuk golongan yang anti NKRI dan Pancasila. Tindakan tegas ini tentu tidak hanya di "pihak hilir", justru yang sangat penting adalah "pihak hulu"-nya, sebagai aktor intelektual dan penyuplai dana.

**Ketiga; Pembinaan**

Yaitu pemerintah harus mengetahui Warga Negara Indonesia yang ada

di luar negeri, terutama mereka yang menimba ilmu dan yang bekerja. Bagi mereka yang dididik oleh negara yang didalamnya terindikasi doktrin-doktrin kekerasan, sebelum mereka menyebarluaskan pahamnya itu maka harus diadakan orientasi tentang keindonesiaan. Juga perlu diadakan program pembinaan kepada masyarakat, seperti pelatihan anti radikal-terorisme kepada Ormas, sosialisasi kepada segenap unsur pendidikan, dan ToT (*Training of Trainer*) kepada civitas lembaga pendidikan keagamaan. Hal ini merupakan upaya strategis untuk menguatkan kewaspadaan dini masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap penyebaran paham radikal terorisme.

Sebelum melakukan metode penyelesaian konflik, yang pertama kali dilakukan satuan komando kewilayahan adalah melakukan **pembenahan internal (persiapan)** dan selanjutnya tindakan **aplikatif (pelaksanaan)**. Pembentukan internal dilakukan dengan pembentukan bidang organisasi, personel, materiil, peranti lunak, pangkalan, dan latihan.

# PEMBENAHAN INTERNAL

## 1. Organisasi

Pembenahan bidang organisasi bertitik tolak pada keragaman komunitas di Indonesia. Pada dasarnya, semakin kompleks kehidupan sosial kemasyarakatan di suatu daerah maka akan menciptakan semakin beragamnya komunitas yang ada. Komunitas masyarakat di kota megapolitan seperti Jakarta dengan jumlah penduduk 9.988.329 jiwa, tentu akan jauh berbeda kompleksitasnya dengan masyarakat di ibu kota Kabupaten Maluku Tengah (Masohi) yang hanya berpenduduk 47.758 jiwa. Untuk itu, perlu restrukturisasi organisasi satuan kewilayahan sehingga sesuai dengan tantangan tugas di wilayah yang berbeda. Sebelum melakukan restrukturisasi organisasi, diperlukan kajian dan pengamatan secara intensif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, lengkap dengan kebutuhan karakteristik personel

yang cocok untuk ditempatkan di daerah tersebut. Harapannya, organisasi Kowil nantinya akan berbeda sesuai, dengan tantangan wilayah yang dihadapinya. Contohnya, apabila di satu kelurahan/desa memiliki kompleksitas yang tinggi dan tidak dapat diatasi oleh seorang Babinsa maka di kelurahan/desa tersebut dapat ditugaskan lebih dari satu Babinsa.

## 2. Personel

Titik berat pembentukan personel ada pada alur pembinaan personel yaitu penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan. Semua aspek ini harus menjadikan tugas pokok dan tantangan tugas kewilayahan sebagai sudut pandang pertama. Tantangan restrukturisasi bidang personel yang utama ada pada penyediaan, pendidikan, dan penggunaan personel. Ketiga hal ini mutlak diperhatikan, bila ingin mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal. Penyediaan personel yang akan ditugaskan mengisi jabatan di satuan Kowil harus memiliki kemampuan dasar, psikologi, dan pertimbangan lain yang akan mengoptimalkan tugas-tugas kewilayahan. Setelah sumber daya diperoleh, perlu dilakukan pembekalan terus

## TOLERANSI HARGA MATI



menerus untuk memberikan kemampuan awal, kemampuan lanjutan, dan meng-*update* kemampuan, sesuai dengan perkembangan tantangan kewilayahan.

### 3. Materiil

Meliputi penentuan kebutuhan, penelitian dan pengembangan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan. Di bidang materiil, perbedaan ada pada penentuan kebutuhan, penelitian dan pengembangan, serta pendistribusian materiil. Penentuan kebutuhan, diawali dengan penelitian dan pengkajian mengenai kebutuhan materiil yang diperlukan berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas. Contohnya untuk masuk ke komunitas geng motor, tentu diperlukan materiil berupa sepeda motor sebagai bahan kontak. Kegiatan penelitian dan pengembangan juga perlu dilakukan untuk mengoptimalkan materiil, sistem, dan metode serta personel sehingga dapat menyesuaikan dengan komunitas yang ada di wilayah. Pendistribusian materiil harus dilakukan secara cermat untuk memastikan materiil yang tepat diberikan sesuai dengan kebutuhan *comdev*.

### 4. Peranti lunak

Meliputi kualitas dan kuantitas. Di bidang kualitas, perlunya *update* besar-besaran terhadap peranti lunak bidang teritorial. *Update* ini tidak perlu terpaku pada ketersediaan buku petunjuk namun dapat mencari referensi dari umum, yang berkaitan dengan komunitas di seluruh Indonesia, yang dapat dilakukan klasifikasi dan prioritas terhadap seluruh komunitas. Secara umum, masyarakat Indonesia dapat dibagi berdasarkan ras, bahasa, bangsa, dan agama. Lebih jauh lagi, kemajemukan masyarakat Indonesia disebabkan oleh latar belakang historis, kondisi geografis, dan keterbukaan terhadap budaya luar. Di bidang kuantitas, perlu dibuat daftar komunitas di setiap daerah dan referensi penunjang tugas aparat Kowil dalam melakukan *comdev*.

### 5. Pembinaan pangkalan

Sedapat mungkin pangkalan dapat memberikan rasa nyaman bagi komunitas untuk menyampaikan aspirasinya. Asrama Kowil sebaiknya tidak berkesan angker atau sulit didatangi, sebaliknya harus memberikan kesan ramah dan simpatik sehingga

masyarakat melalui komunitas yang ada tidak sungkan, ragu, dan takut untuk masuk ke markas Kowil.

### 6. Latihan

Tanpa latihan, semua pembenahan internal yang sudah dilakukan akan menjadi kurang optimal. Latihan dapat diselenggarakan secara terpusat dengan asistensi Pusat Teritorial TNI AD maupun diselenggarakan oleh satuan Kowil yang lebih tinggi. Yang terpenting adalah kesinambungan dan kesamaan visi dan misi latihan. Latihan juga tidak terpaksa pada lembaga latihan resmi TNI AD namun dapat juga menerima pelatihan dari lembaga sipil dan pemerintahan, misalnya kementerian pertanian, sosial, dan lain sebagainya.

Pembenahan internal tersebut harus dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan pembinaan teritorial. Selain pembenahan internal, hal yang sangat penting dalam melaksanakan program *comdev* tentunya “Anggaran”. Anggaran selain dari anggaran rutin/program, dapat diperoleh dari CSR (*Corporate Social Responsibility*). Sumber dana pertama adalah menggunakan anggaran yang berasal dari program rutin, yaitu menyinkronkan dengan beberapa program kegiatan yang ada di Kodim, seperti kegiatan Binjaring dan Litgal staf intelijen, kegiatan Binkomsos, Bintangwil, dan ketahanan pangan.

Sumber dana kedua adalah menggunakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Mengapa menggunakan anggaran CSR, karena pada dasarnya *comdev* apabila dikaitkan dengan pembangunan, tidak terlepas dari pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Artinya, pembangunan itu memang untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka nantinya. CSR juga merupakan satu bentuk tanggung jawab

dan kepedulian perusahaan, bukan hanya terhadap masyarakat sekitarnya namun juga lebih luas merupakan tanggung jawab terhadap masyarakat luas dan konsumen yang menggunakan produknya. Dengan kata lain, perusahaan tidak semata-mata memikirkan sisi keuntungan finansial yang hanya berdampak secara internal terhadap perusahaan namun perusahaan juga peduli, membantu, dan memberikan dampak positif secara sosial, ekonomi, dan lingkungan kepada unsur eksternal, khususnya masyarakat sekitarnya. Hal ini sesuai dengan amanat

Stratifikasi komunitas		Satkowil pembina
Sejenis	Berlainan jenis	
<i>Single community</i>	<i>Single community</i>	Babinsa
<i>Local community</i>	<i>Local multi community</i>	Babinsa / Koramil
<i>Area community</i>	<i>Area multi community</i>	Kodim / Korem / Kodam
<i>Super community</i>	<i>Indonesian community</i>	TNI AD
<i>Indonesian community</i>		TNI AD

perundang-undangan, yaitu UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 74 serta UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15,17 dan 34. S contoh penggunaan CSR ini adalah perusahaan pertambangan yang memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan dana kepada komunitas penduduk di sekitar area operasional pertambangan, yang digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Produsen sepeda motor memberikan bantuan dana dan suku cadang untuk meningkatkan prestasi pembalap motor pada suatu tim balap motor.

Pelaksanaan kegiatan *comdev* dapat dilaksanakan melalui metode Binter yaitu komunikasi sosial (Komsos), bakti TNI, dan pembinaan perlawanan wilayah (Binwanwil). Dengan melaksanakan ketiga metode ini, *comdev* dapat dijalankan secara beriringan dengan kegiatan yang sudah diprogramkan terhadap Kodim. Perbedaan yang ada yaitu penajaman fokus pada komunitas di lingkungan sosial.

Kegiatan yang pertama dilakukan dapat menggunakan program Binjaring dan Litgal untuk pendataan komunitas yang ada secara terperinci misalnya

pimpinan, anggota, kegiatan, lokasi berkumpul, dan lain sebagainya. Setelah komunitas terdata secara lengkap, dilaksanakan kegiatan Binkomsos untuk mendekatkan aparatur Kowil (Apkowil) dengan komunitas yang ada. Setelah terjalin ikatan erat antara Apkowil dengan komunitas, dilakukan kegiatan Bakti TNI, dengan meningkatkan kemampuan komunitas secara perorangan maupun kolektif. Kegiatan yang terakhir dilakukan adalah Binwanwil, yaitu dengan memanfaatkan potensi komunitas berupa kemampuan dan keterampilan dalam rangka upaya bela negara, guna menangkal setiap ancaman dan gangguan yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Metode Binter tersebut dilaksanakan secara bersamaan dan berkesinambungan. Artinya dalam pelaksanaannya tidak ada kata selesai. Ketiga metode Binter itu harus terus menerus dilaksanakan mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis. Secara umum, kegiatan yang dilaksanakan terhadap komunitas adalah melakukan penguatan internal komunitas (tunggal atau jamak), kemudian menggabungkan antar komunitas (tunggal atau jamak), baik yang sejenis maupun berlainan jenis.

Kegiatan pertama adalah penguatan internal, yang dapat dilakukan melalui tiga langkah, yaitu penguatan internal komunitas, penguatan antar komunitas, dan penguatan dengan memanfaatkan pihak ketiga. **Penguatan internal**, dilakukan dengan memanfaatkan anggota komunitas itu sendiri, yang memiliki kemampuan lebih dan dapat mengajarkan kemampuannya kepada anggota komunitas yang lain. Contohnya pada komunitas pesantren, santri yang dianggap memiliki kemampuan berdakwah lebih, dapat mengajarkan kemampuan dakwahnya kepada anggota lain. **Penguatan antar komunitas**, dapat



# hoax

dilakukan antar komunitas yang sejenis maupun tidak sejenis. Antar komunitas sejenis, contohnya pada satu komunitas geng motor memiliki anggota yang ahli dalam hal mekanik mesin maka dia dapat mengajarkan kemampuannya kepada komunitas geng motor yang lain. Antar komunitas tidak sejenis, contohnya untuk memberikan budi pekerti yang luhur kepada komunitas geng motor, dapat dilakukan penanaman nilai-nilai agamis oleh santri dari komunitas pesantren yang dapat melebur bersama komunitas geng motor. Penguatan dengan pihak ketiga, dilakukan dengan pihak profesional, contoh: untuk menghilangkan semangat radikalisme pada komunitas pesantren yang memiliki ajaran radikal, dapat dengan memberikan ceramah nasionalisme oleh seorang tokoh nasionalis yang diterima di dalam komunitas.

*Comdev* yang dilakukan harus memiliki semangat untuk merubah kondisi komunitas menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi kegiatan bela negara. Contoh dalam penanganan radikalisme dan terorisme, yakni pada komunitas yang cenderung radikal dapat dimasukkan ideologi nasionalisme/Pancasila serta ajaran agama yang melarang radikalisme. Pada komunitas yang rawan terpengaruh kekerasan dan terorisme seperti komunitas preman, dapat diberikan pelatihan keterampilan dan ceramah nasionalisme/Pancasila sehingga dapat merubah kehidupan preman yang dekat dengan pengangguran dan kekerasan.

Setelah *comdev* di satu komunitas dapat diperkuat, dilakukan kegiatan kedua, yaitu meningkatkan rasa persatuan

positif di dalam komunitas tunggal (*single community*) dan antar komunitas sehingga terbentuk *Indonesian community*, yang merupakan persatuan antar komunitas di seluruh Indonesia. Contohnya, Babinsa masuk ke komunitas pengajian di beberapa masjid didalam satu kelurahan, memperkuat ikatan komunitas di masjid tersebut, dan menimbulkan rasa keterikatan dengan komunitas pengajian lain yang berada di satu kelurahan sehingga terbentuk komunitas lokal (*local community*) tingkat kelurahan. Danramil beserta jajarannya berupaya untuk memperkuat ikatan antar kelurahan sehingga terbentuk *local community* pengajian tingkat kecamatan, selanjutnya terbentuk komunitas area (*area community*) pada tingkat provinsi, dan akhirnya terbentuk komunitas super (*super community*) pengajian tingkat nasional.

Tahap pembentukan *single community* sampai dengan *Indonesian community* dapat dilakukan terhadap satu jenis komunitas maupun terhadap komunitas yang berlainan. Penggabungan ini menciptakan asimilasi sosial atau pembauran dua kebudayaan, yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Pembentukan *multi community* dapat dilakukan mulai dari tingkat desa sehingga di tingkat Kodim sudah dapat terbentuk *area multi community*. Contohnya, komunitas keagamaan di Jakarta Selatan dapat terdiri dari komunitas Muslim, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Komunitas geng motor memiliki keterikatan dengan komunitas geng mobil, komunitas produsen

kendaraan, komunitas retailer aksesoris dan *spareparts*, komunitas pembalap, komunitas mekanik, dan lain sebagainya. Dengan terbentuknya *multi community*, setiap komunitas akan memiliki peran yang saling membutuhkan sehingga dapat membentuk satu ikatan. Sebagaimana dijelaskan oleh David Berry, seorang ilmuwan asal Amerika Serikat, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

Apabila rasa keterikatan ini semakin besar antar *super Network* antar komunitas ini dapat dilakukan di semua komunitas. Apkowil di suatu daerah harus dapat bahu-membahu dan bekerjasama dalam menciptakan *comdev* di daerahnya. Setiap Apkowil tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat saling menutupi. Tugas komandan satuan adalah mengetahui kelebihan dan kekurangan anggotanya, kemudian menugaskan sesuai dengan kemampuannya. Yang perlu digaris bawahi adalah jangan sampai ada suatu komunitas masyarakat yang merasa terkucilkan dan merasa diperlakukan tidak adil, karena rasa ketidakadilan ini dapat menjadi pemicu perpecahan.

Untuk membentuk sebuah *super community* dan *Indonesian community* dapat dilakukan metode kompetisi, kompromi, akomodasi, dan kolaborasi. Kompetisi dilakukan terhadap komunitas-komunitas yang hanya dapat menerima superioritas pihak lain sebelum menyatakan dapat bergabung. Kompromi dilakukan terhadap komunitas yang cenderung sulit bergabung. Kompromi dilakukan dengan



## Mayor Arh R. Jatmikoadhi Pramantyo Cahyono, S.E.

Lahir di Madiun 1980. Selesai lulus Akmil 2001 lalu mengikuti Sussarcab Arhanud (2002), Diklapa II Arhanud (2011), dan terakhir Dikreg Seskoad (2015). Pernah menjalani pendidikan spesialisasi Sussar Para (2000), Scuba Diver (2002), Combat Intel (2002), Suspa Jasmil (2004), Suspa Ops Yon Arhanud (2007), Susdanrai Arhanud (2009), UN Logistic Officers Course (2014), DISAM FMS Course (2016), dan Sertifikasi PBJ (2016). Penugasan Operasi Operasi Pam Rahwan Maluku (2003) dan Operasi Pam Rahwan Malut (2005). Adapun prestasi yang pernah diukir; sebagai pelajar terbaik ke-3 dan penulis Karlismil terbaik ke-3, saat menjadi siswa Dikreg LIII Seskoad (2015), serta memperoleh Collin East Award (2015) dari Australia. Saat ini menjabat sebagai Kabag Litbangmat Sdirbinlitbang Pussenarhanud Kodiklat TNI AD.

melakukan negosiasi. Akomodasi dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik antara komunitas yang sulit disatukan. Metode kolaborasi dilakukan dengan menghimpun komunitas yang berbeda tersebut menjadi satu kesatuan dengan dasar NKRI sehingga tidak ada lagi perbedaan antara komunitas didalam payung NKRI. Empat metode tersebut sebenarnya dapat merangkul komunitas-komunitas yang rentan terhadap pengaruh radikalisme dan terorisme, sebab bila komunitas yang rentan ini dapat mengikatkan diri dengan komunitas lain yang berbeda, maka pola pikir radikalisme dan

terorisme yang dianut akan melebur dan hilang.

Setelah terbentuk *super community* maka digunakan metode penolakan, untuk mencegah masuknya ide-ide radikalisme dan terorisme ke dalam komunitas yang sudah dibina tersebut. Apabila ikatan komunitas dapat dijamin keeratannya maka ide negatif ini tentunya berasal dari orang di luar komunitas. Langkah lebih lanjut adalah merangkul komunitas yang menyebarkan ide radikalisme dan terorisme itu agar mengikatkan diri dalam *super community*, tentunya dengan meninggalkan ide radikalisme dan terorisme yang dimiliki.

## PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan:

**Pertama;** bahwa paham kelompok radikal dan teroris dapat dikurangi bahkan dihilangkan, dengan menimbulkan asimilasi atau pembauran ke arah positif untuk mengurangi/menghilangkan pola pikir radikalisme dan terorisme.

**Kedua;** satuan Kowil perlu melaksanakan tindakan pembenahan internal yang diperlukan, dan koordinasi mengenai anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan *comdev*.

**Ketiga;** Apkowil perlu melaksanakan *comdev* dalam rangka membentuk ikatan yang erat internal komunitas. Ikatan ini harus terus dikembangkan ke komunitas lain yang sejenis dan tidak sejenis sehingga menjadi *super community* dan *Indonesian community* (komunitas Indonesia).

**Keempat;** semakin besar komunitas, akan semakin besar pula pengaruh yang dapat disebarkan Apkowil melalui komunitas.

Beberapa hal yang disarankan:

**Pertama;** perlunya pembenahan internal yang meliputi aspek organisasi, personel, materiil, peranti lunak, pangkalan, dan latihan, menyesuaikan dengan tantangan tugas kewilayahan.

**Kedua;** Apkowil diberi pembekalan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan sehingga dapat mudah melebur ke suatu komunitas. Bakat, minat dan kemampuan Apkowil di setiap satuan teritorial harus didata dengan tertib sehingga konsep ToD dan ToA menyesuaikan dengan karakteristik wilayah yang didalamnya terdapat komunitas tertentu.

**Ketiga;** perlunya usaha yang masif, terstruktur dan sinergis di seluruh TNI AD, terutama Apkowil sehingga dapat terwujud *super community*, yang pada akhirnya akan terwujud *Indonesian community*, yang memiliki ikatan erat di dalam bingkai NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945.



"Pupuk Keong"

BABINSA  
ACEH TIMUR



# TNI

sebagai penjaga kedaulatan negeri ini bukan hanya berjuang dengan senjata tetapi juga berjuang untuk mengangkat harkat, martabat, dan derajat rakyat Indonesia. Babinsa (bintara pembina desa) sebagai ujung tombak TNI berdiri di barisan paling depan untuk mewujudkan ketahanan masyarakat dari berbagai sisi dan berusaha membantu mengatasi persoalan yang ada didalam kehidupan masyarakat, mulai dari hal-hal yang paling sederhana.

Krisis ketahanan pangan, ketahanan energi, krisis kebangsaan, dan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan lainnya, menjadi alasan kuat bagi TNI untuk bersatu-padu dengan rakyat dan bersinergi dengan pemerintah dalam menjalankan program-program kerakyatan demi menciptakan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah NKRI. Kesejahteraan rakyat yang masih belum merata bukan untuk sekedar dikritisi tetapi perlu tindakan nyata. Terlebih lagi bagi kondisi masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil yang susah untuk dijangkau. Program kreatif dan efektif bagi kebutuhan rakyat terus dilakukan guna mempercepat tercapainya keberhasilan bangsa ini, khususnya dalam hal ketahanan pangan.

Krisis ketahanan pangan menjadi masalah yang paling krusial bagi

bangsa ini. Saat ini, upaya mewujudkan ketahanan pangan harus terus ditingkatkan karena masih banyak lahan yang belum diberdayakan dan hasil produksi pertanian belum mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Semua ini bertujuan agar kita, bangsa Indonesia, tidak perlu lagi impor bahan pangan, bahkan kita akan selalu siap setiap saat, sekali pun kita mengalami embargo pangan dari luar.

Dalam upayanya mendukung program pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan, TNI bersinergi dengan berbagai instansi terkait. Para prajurit TNI khususnya TNI AD, telah bergerak memberikan penyuluhan kepada para petani tentang pentingnya sistem bercocok tanam, mendampingi instansi pemerintah (dinas pertanian) dalam menyalurkan

pupuk kepada kelompok tani, sekaligus mendampingi mereka dalam aktivitas pengolahan tanah pertanian. Babinsa selalu berperan aktif memberikan

kontribusi nyata kepada para petani, bukan hanya terkait dengan kegiatan bercocok tanam namun juga berusaha dalam hal peningkatan hasil pertanian, diantaranya dengan berupaya melakukan inovasi-inovasi untuk menciptakan pupuk yang besar manfaatnya bagi para petani. Semua itu bertujuan agar hasil pertanian para petani menjadi lebih maksimal sehingga dapat membantu meningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih baik.

Terkait hal tersebut di atas, Babinsa Koramil 24 Kodim 0104/Aceh Timur senantiasa berupaya untuk membuat inovasi dan terobosan, semata-mata untuk membantu masyarakat khususnya kaum petani. Kegiatan ini terutama dalam menjawab keluhan masyarakat yang sering disampaikan kepada

“KESEJAHTERAAN  
RAKYAT YANG MASIH  
BELUM MERATA BUKAN  
UNTUK SEKEDAR  
DIKRITISI TETAPI PERLU  
TINDAKAN NYATA”



Babinsa di setiap musim tanam, yakni tentang kebutuhan/kelangkaan pupuk.

Berawal dari tahun 2013, saat Kodim 0104/Aceh Timur mendapat perintah dari Komando Atas untuk mengirimkan personelnnya mengikuti kegiatan pertanian berupa penataran di Kerinci, Provinsi Jambi. Dua orang mendapat tugas dari komandan kodim, yang salah satunya adalah Serda Gazali, Babinsa Koramil 24/Idi Tunong Kodim 0104/Aceh Timur.

Berbekal pengalaman ditambah



dengan pembelajaran pertanian yang didapatkan dari Jambi, Serda Gazali berusaha menciptakan pupuk baru yang bisa membantu meringankan beban petani, dengan melakukan berbagai percobaan demi percobaan untuk membuat pupuk organik, pengganti pupuk buatan berbahan kimia. Dengan kegigihan serta ketekunan akhirnya pupuk yang diinginkan berhasil diciptakan. Pupuk tersebut adalah Pupuk Organik Cair (POC) berbahan dasar Keong Mas (Golden Snail). Pupuk

cair yang dihasilkan dari pemanfaatan lingkungan tersebut hanya memerlukan biaya produksi/pembuatan yang rendah namun mampu meningkatkan produksi pertanian secara maksimal. Bahan dasarnya berupa binatang keong mas, yang diperoleh dari sekitar lingkungan perumahan maupun perkantoran, yaitu di sekitar saluran irigasi dan area persawahan.

Pupuk keong pertama kali dibuat dengan menggunakan bahan katalisator yang dibeli dari Yogyakarta, Jawa

#### **Pencarian & pengumpulan Keong Mas**

Tengah, seperti Auksin, Sitokinin dan Giberalin. Awal uji coba produk ini diterapkan di sawah seluas satu hektar milik petani di wilayah Kecamatan Idi Tunong, dengan perolehan hasil panen pada Musim Rendengan, sebelum menggunakan pupuk keong sebanyak 4,6 Ton/Ha, dan ketika memanfaatkan pupuk keong mendapatkan hasil 7,5 Ton/Ha.

**COMBUJER** merupakan hormon yang mampu merangsang pembuahan tanaman sehingga melipat gandakan pembuahan, menebalkan daging buah yang dapat dipergunakan pada seluruh tanaman baik tanaman keras ataupun sayur sayuran

**COMBUJER** terbuat dari bahan-bahan organik sehingga tidak membahayakan tanaman dan tanah bila dipakai dalam jangka panjang.

**ZPT TANAMAN HORMON BUAH**

**KODIM 0104/ATIM KORAMIL 18/BRB**

**KEUNGGULAN COMBUJER :**

1. Mempercepat masa pembungaan
2. Memperbanyak bunga
3. Memaksimalkan hasil
4. Mempercepat penuaan buah
5. Mempercepat masa panen

**Cara Penggunaan :**  
Larutkan **COMBUJER** 50cc dengan 14 Liter untuk tanaman muda dan 100 cc pada tanaman tahunan (Dapat disemprotkan atau disiram serta dapat juga melalui pengimpusan batang )

Seiring dengan perkembangan pertanian, pada tahun 2015 pupuk keong ini dikembangkan dengan menggunakan hormon buatan sendiri dan tidak lagi menggunakan Auksin, Sitokinin maupun Gibberalin. Caranya mengganti dengan cara menambahkan bahan organik seperti toge, bonggol pisang, dan rebung bambu. Satu bahan kimia yang masih digunakan yaitu “EM 4 Pertanian”, yang didapatkan dari toko pertanian.

Pembuatan Pupuk Cair Babinsa (Pupuk Keong) ini dimulai pada Rabu, 18 Februari 2015 di Lapangan Makoramil 24/Idi Tunong, dan diikuti oleh 30 orang yang terdiri dari personel Koramil termasuk Babinsa, Mantri Tani, Kepala Kelompok Tani (Kapotkan), Penyuluh, dan para Kepala Gampong/ Kampung (keuchik/geuchik).

Penerapan pupuk keong menggunakan pengganti dari hormon yang sudah ada, dilaksanakan di persawahan seluas 30 Ha di wilayah Kecamatan Birem Bayeun, bekerjasama dengan kelompok tani (Poktan) Gadeng Jaya dan Poktan Gadeng Baro. Sebelum menggunakan pupuk keong, hasil panen mereka rata-rata 4,5 – 4,7 ton/

Ha namun setelah menggunakannya hasil menjadi berbeda jauh. Di lokasi persawahan milik Poktan Gadeng Jaya, pada musim tanam gaduh hasil yang didapat sebanyak 6,5 ton/Ha (tanpa pupuk kimia), sedangkan di Poktan Gadeng Baro hasil panennya menjadi 7,6 ton/Ha (menggunakan pupuk kimia).

Keong mas atau siput sawah dalam keadaan masih hidup dan berada dalam habitat alaminya sangat merugikan bagi petani, yaitu sebagai hama. Akan tetapi, melalui pengolahan dengan cara tertentu, limbah daging keong mas justru dapat dimanfaatkan sebagai pupuk bagi pertanian. Keong dikumpulkan dan disimpan dalam satu wadah hingga mencapai jumlah yang dibutuhkan, lalu ditambahkan air secukupnya dan selanjutnya dimasukan bahan-bahan lain, seperti: tepung beras ketan, kapur pertanian, dan beberapa bahan lainnya. Setelah semua bahan tersebut tercampur rata, keong dидiamkan selama 14 hari, dan akhirnya pupuk cair keong itu sudah dapat digunakan.

Untuk kita pahami, pupuk merupakan unsur yang sangat dominan untuk keberhasilan pertanian. Semua

jenis tanaman memerlukan pupuk yang cukup untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam setiap musim panen. Pupuk yang biasa digunakan oleh para petani adalah pupuk urea, NPK, TSP dan masih banyak jenis lainnya. Notabene semua jenis pupuk tersebut adalah pupuk buatan yang mengandung bahan kimia (pupuk kimia). Pupuk tersebut sering menjadikan permasalahan bagi para petani karena susah didapatkan/langka di pasaran. Faktor penyebab langkanya pupuk sangat beragam, diantaranya karena ulah distributor yang nakal, dengan merubah pupuk subsidi menjadi pupuk non subsidi untuk dijual ke perusahaan. Permasalahan lainnya adalah terjadinya penumpukan pupuk, karena disaat petani belum waktunya untuk menggunakan pupuk namun alokasi pupuk tetap berjalan sehingga pupuk ditumpuk di gudang. Akibatnya, pupuk menjadi rusak dan ketika tiba saatnya digunakan, pupuk sudah tidak bisa dipakai.

Pembuatan pupuk oleh Babinsa Koramil 24 Kodim 0104/Aceh Timur tersebut mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pertanian (Kementan). Hal ini disampaikan oleh pihak Kementerian Pertanian saat berkunjung ke wilayah Idi Tunong meninjau kegiatan pertanian. Menurutnya, pupuk yang dihasilkan prajurit TNI AD itu merupakan terobosan baru yang dilakukan TNI dalam membantu masyarakat petani. Kegiatan ini sekaligus merupakan bukti keseriusan TNI dalam kontribusi membantu pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Bahkan, petugas/ aparat Kementan RI itu mengatakan bahwa pupuk cair berbahan dasar keong atau “Pupuk Keong” temuan Babinsa Kodim 0104/Aceh Timur tersebut sudah dilaporkan kepada Menteri Pertanian RI dan mendapatkan tanggapan yang positif.

# Bahan Pupuk Keong

## Auksin (hormon untuk akar)

Bahan yang dibutuhkan untuk fermentasi keong menjadi pupuk cair adalah Auksin. Auksin diperoleh dengan membuat sendiri atau membeli Auksin yang sudah jadi. Pembelian Auksin membutuhkan biaya yang sangat mahal. Pembelian Auksin hanya bisa dilakukan dengan membeli ke agen tempat penjualan Auksin yang berada di Kota Yogyakarta, dengan cara pemesanan dan uang dibayar dimuka. Untuk keperluan pembuatan pupuk keong, harga Auksin yang mahal dan susah didapatkan petani, disiasati dengan membuat sendiri, yakni menggantinya dengan bahan-bahan yang ada dan mudah dijangkau. Caranya adalah dengan mengolah: satu kg keong mas/bekicot, satu kg toge, satu liter air tebu, lima liter air, dan satu gelas EE4 atau MDL yang bisa dibeli di toko-toko pertanian dengan harga yang relatif terjangkau oleh kalangan masyarakat ekonomi lemah. Adapun untuk bahan tanaman tebu, setiap satu kg batang tebu hanya diambil sepanjang enam sentimeter yang menempel di tanah .

### Cara pembuatannya

Keong mas direbus sampai mendidih, kemudian diambil dagingnya. Setelah dingin, dimasukkan EE4, kemudian diaduk sampai rata. Setelah tercampur secara merata, lalu diblender sampai hancur. Selanjutnya dimasukkan ke dalam wadah plastik/ember, ditutup dengan plastik, lalu diikat dengan karet, dan simpan, dengan meletakkannya di tempat yang teduh selama 15 hari.

## Sitokinin (hormon untuk batang)

Bahan yang dibutuhkan untuk fermentasi keong menjadi pupuk cair adalah Sitokinin. Sitokinin diperoleh dengan cara membuat sendiri atau membeli yang sudah jadi ke agen penjualannya di Kota Yogyakarta. Untuk menghemat waktu dan biaya, dilakukan pembuatan pengganti Sitokinin tersebut (membuat sendiri), dengan menyediakan satu kg bonggol pisang, lima liter air kelapa, satu liter air tebu kuning ½ mtr dari tanah, dan satu gelas EE4 atau MDL yang bisa dibeli di seluruh toko pertanian dengan harga yang relatif terjangkau oleh kalangan masyarakat ekonomi lemah. Bahan yang lainnya satu kg tebu diambil yang dekat tanah enam sentimeter sampai dengan nempel tanah.

### Cara pembuatannya

Bonggol pisang diblender, dicampurkan dengan semua bahan, diaduk sampai merata, dimasukkan ke dalam ember yang ditutup dengan plastik, lalu diikat dengan karet, dan simpan di tempat yang teduh, selanjutnya didiamkan selama 15 hari.

## Giberalin (hormon penyubur buah)

Bahan yang dibutuhkan untuk fermentasi keong menjadi pupuk cair adalah Giberalin. Giberalin diperoleh dengan membuat sendiri atau membeli Giberalin yang sudah jadi. Pembelian Giberalin yang sudah jadi, sama dengan pembelian Auksin maupun Sitokinin yakni ke Yogyakarta, yang tentunya mahal harganya sehingga memberatkan masyarakat petani. Untuk menggantikan Giberalin ini, dibutuhkan satu kg rebung bambu, lima liter air, satu gelas EE4 atau MDL. Bahan lainnya adalah satu kg tebu, diambil dari yang dekat tanah (enam sentimeter) sampai dengan yang nempel tanah.

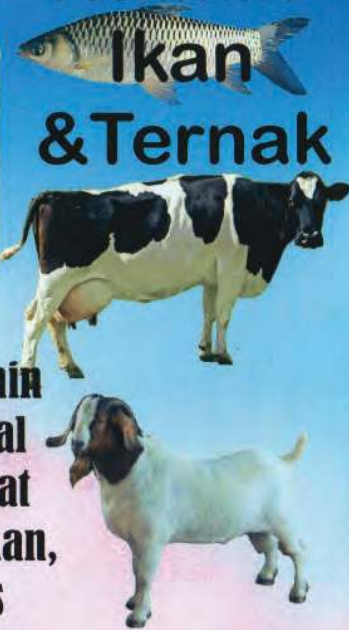
### Cara pembuatannya

Rebung diblender dan campurkan dengan bahan lainnya. Aduk sampai merata lalu masukkan ke dalam ember, tutup dengan plastik, ikat dengan karet, simpan di tempat yang sejuk, dan diamkan selama 15 hari.

PERANGSANG TERNAK ORGANIK

# VITER

Organik  
Vitamin  
Ikan  
& Ternak



Mengandung vitamin protein dan mineral penting yang sangat diperlukan oleh ikan, ternak dan unggas



KODIM 0104/ATIM KORAMIL 18/BRB



Viter organik merupakan concentrat ternak, ikan dan unggas yang diolah dari berbagai macam bahan alami tumbuh-tumbuhan yang dapat memberikan zat-zat yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan produktivitas serta kesehatan ikan, ternak dan unggas.

Viter organik sangat baik digunakan untuk pembesaran atau penggemukan : Sapi, Kambing, Ayam, Ikan, Udang, dsb yang berfungsi sebagai berikut :

- Mempercepat pertumbuhan ternak, ikan dan unggas
- Meningkatkan nafsu makan ikan, ternak dan unggas
- Meningkatkan pertambahan berat dan bobot badan ternak
- Menambah kandungan gizi untuk unggas, ikan dan ternak
- Mengurangi stres dan angka kematian ternak
- Mengurangi bau kotoran ternak
- Meningkatkan produktivitas daging pada ternak
- Mempercepat waktu panen
- Viter organik aman untuk unggas, ikan, ternak dan lingkungan.



Aturan pakai :

Temak Besar	Ternak Kecil	Ternak Unggas	Perikanan
Sapi, Kerbau	Kambing, Domba	Ayam, Itik, Burung, dll	Ikan mas, Lele, Nila, Bandeng dan Gurame, dll
Campurkan 50 cc viter dengan 14 ltr air	Campurkan 50 cc viter dengan 14 ltr air	Campurkan 50 cc viter dengan 14 ltr air	Campurkan 50 cc viter dengan 14 ltr air
Keterangan : - Unggas pedaging viter diberikan setiap hari - Unggas petelur viter diberikan 3 hari sekali			

INSEKTISIDA ORGANIK

# PREDATOR

KODIM 0104 - ATIM & KORAMIL 18/BRB



PREDATOR merupakan insektisida organik hasil ekstraksi dari berbagai bahan alami untuk membasmi hama penting pada tanaman hortikultura maupun tanaman tahunan. predator mempunyai sifat mudah terurai di alam sehingga tidak mencemari lingkungan, aman bagi manusia, hewan piaraan, serta musuh alami hama tanaman, tanaman/buah bebas residu kimia dan aman dikonsumsi. predator tidak membunuh hama secara cepat, tetapi berpengaruh pada daya makan, pertumbuhan dan menghambat pembentukan serangga dewasa.

SIFAT KERJA INSEKTISIDA ORGANIK PREDATOR :

Predator memiliki daya kerja dalam mengurangi nafsu makan Organisme Pengganggu Tanaman atau menghancurkan organisme pengganggu tanaman sehingga tanaman lebih banyak, walaupun pada serangga/hama.

Predator dibuat dari bahan alami maka sifatnya seperti :

- Tanaman atau buah terbebas dari residu kimia dan aman untuk dikonsumsi
- Sangat baik bagi manusia, hewan piaraan, serta musuh alami hama tanaman
- Mudah terurai di dalam alam sehingga tidak mencemari lingkungan

HAMA SASARAN :

wereng, walang sangit, penggerek batang, belalang, kepik, thrips, tungau, ulat grayak.

ATURAN PAKAI :

Larutkan 10 cc - 15 cc / 1 liter air (7-10 tutup/tangki). Aduk sampai merata. Semprotkan/gemborkan pada tanaman yang terkena serangan hama secara merata. Untuk hasil yang maksimal sebaiknya tanaman disemprot/digembor sesering mungkin, minimal 3 (tiga) kali penyemprotan pada sore hari.



## Cara pembuatan Pupuk Keong



Proses pembuatan Pupuk Cair Keong

**KEONG** sebagai bahan dasar pembuatan pupuk cair tersebut didapat dari sekitar lingkungan perumahan. Keong dikumpulkan dan disimpan hingga mencapai jumlah yang

dibutuhkan, sebanyak 100 kg. Bahan dasar selain keong, juga bisa dengan pengganti keong, yakni bekicot. Keong akan mudah didapat di sekitar saluran irigasi atau di sekitar areal pesawahan.

Sedangkan bekicot mudah didapat di sekitar perkebunan pisang.

Setelah keong terkumpul, ditambahkan air sebanyak 200 liter, selanjutnya dimasukan bahan-bahan lain yang sudah disiapkan yaitu dedak atau biasa disebut dengan katul (bila katul sulit didapat, bisa diganti dengan tepung beras ketan). Kemudian masukan juga kapur pertanian dan bahan Auksin. Setelah Auksin dimasukan/dicampurkan keong, aduk hingga Auksin tercampur merata .

Berikutnya, campurkan Sitokinin dan Giberalin ke dalam wadah yang berisi keong, lalu diaduk hingga merata. Setelah seluruh bahan tercampur merata, keong ditutup dengan plastik, lalu diikat dengan karet bekas ban, dan diamkan selama 15 hari hingga keong tersebut sudah menjadi pupuk cair yang siap untuk digunakan.

## Cara penggunaan Pupuk Keong

**PUPUK** Cair Babinsa (Pupuk Keong) dapat digunakan untuk semua jenis tanaman. Setiap tanaman berbeda ukuran/takaran pupuk yang disemprotkan. Untuk pemupukan padi dan sayuran, menggunakan takaran: setiap 20 ltr air cukup ditambahkan Pupuk Cair Babinsa sebanyak 3 sendok makan.

Pupuk cair ini selain menambah kesuburan tanaman juga bisa memberikan manfaat lain, sebagaimana yang sudah diterapkan pada tanaman kelapa sawit. Untuk kelapa sawit yang tumbuh subur namun tidak menghasikan buah, cukup disemprotkan pupuk ke seluruh bagian tanaman, hingga tanaman tersebut bisa memberikan hasil yang memuaskan.

Selain tanaman sayuran dan pohon kelapa sawit, pupuk cair tersebut dapat digunakan pada tanaman padi. Padi yang menggunakan pupuk cair berbahan dasar keong mampu



Penyiapan pupuk dan alat penyemprotan.

menghasilkan padi yang maksimal. Pada hasil uji coba pupuk cair berbahan dasar keong tersebut pada tanaman padi. Hasilnya bisa mencapai 52 tangkai setiap dapuran tanaman padi sedangkan yang menggunakan pupuk buatan hanya mendapat 36 tangkai setiap dapuran padi. Untuk produksi hasil panen padi pada setiap hektar, bisa mencapai 10 ton 200 kg. Terbukti, Pupuk Keong ini mampu menjadi alternatif pupuk masa depan karena sangat membantu para petani dalam menghemat keuangan mereka, berupa biaya pemupukan, hingga puluhan juta rupiah.

Lebih dari itu, Pupuk Cair Babinsa (Pupuk Keong) ini selain menyuburkan tanaman juga bermanfaat untuk mengobati hama sawit yang mengakibatkan pembusukan pada buah dan kuncup daun. Untuk mengobati penyakit sawit tersebut, caranya hanya dengan menyemprotkan pupuk cair ke bagian yang terkena penyakit. Penyemprotan dilakukan setiap hari hingga penyakit busuk pada buah dan kuncup daun sawit sudah tidak ada lagi. Takaran pupuk cair yang akan digunakan pemberantasan hama busuk daun dan kuncup, cukup dengan 3 sendok makan pupuk cair ke dalam air

sebanyak 20 ltr.

Pemberantasan hama yang mengakibatkan daun kuning pada tanaman padi juga bisa dilakukan, melalui pemanfaatan pupuk cari ini. Sama dengan pengobatan hama sawit, untuk mengobati/memberantas penyakit pada tanaman padi, hanya dengan menyemprotkan pupuk cair ke bagian yang terkena penyakit. Penyemprotan dilakukan setiap hari hingga penyakit daun kuning sudah tidak ada lagi. Untuk takaran pupuk cair yang digunakan, cukup dengan mencampurkan 3 sendok makan pupuk cair ke dalam air sebanyak 20 ltr.

# SERDA GAZALI

## MENDAPAT PENGHARGAAN

**KEPALA** Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono memberikan penghargaan kepada 13 orang Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang berprestasi. Penghargaan diberikan Kasad pada pembukaan Apel Komandan Korem (Danrem) dan Komandan Kodim (Dandim) terpusat TNI AD tahun 2016, bertempat di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) di Jalan Hegarmanah, Bandung Jawa Barat, Senin 14 November 2016.

Salah satunya Babinsa Koramil 18/Birem Bayeum Kodim 0104/Atim Korem 011/LW Kodam IM, Serda Gazali menerima penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD)





Jenderal TNI Mulyono atas prestasinya menciptakan pupuk berbahan dasar keong dan insektisida (racun hama) dari bahan organik.

Adapun penghargaan yang diterima Serda Ghazali yaitu berupa uang, piagam dan Kaporlap. Tak hanya itu, ia juga menerima satu unit traktor dari Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Menurut Serda Ghazali saat dikonfirmasi mengatakan, pupuk berbahan dasar keong tersebut bisa meningkatkan produksi tanaman. Ia mencontohkan tanaman padi yang biasanya delapan ton per hektar sekali panen, apabila menggunakan pupuk keong hasil bisa lebih meningkat menjadi 10,2 ton per hektar.

“Bahan pupuk keong ini, telah diuji

coba pada tahun 2014 oleh 12 Pok tani di wilayah Kecamatan Idie Tunong, dan hasilnya terbukti. Hasil panennya bisa meningkat, dari 8 ton per hektar, sekarang menjadi 10 ton per hektar,” kata Serda Ghazali.

Tak hanya itu, Serda Ghazali juga menciptakan insektisida (racun hama) dari bahan organik. Ia menjelaskan, cara membuat insektisida (racun hama) dari bahan organik yakni dengan bawang merah, bawang putih, jahe, serih, temulawak kuning, temulawak hitam, lengkuas, dan akar tuba. Kemudian bahan-bahan tersebut difermentasi.

“Setelah difermentasi, bahan tersebut bisa digunakan. Bahan ini juga telah di uji coba pada tahun 2015 di wilayah Idi Tunong oleh 12 Pok tani, di wilayah Birem Bayeun oleh 12 Pok tani,” katanya.

Selain itu, Babinsa Kodim 0104/ Aceh Timur ini juga menciptakan bahan perangsang makan ternak dari bahan organik dengan rebung, toge, jagung muda, jeruk manis, tomat, gula merah, dan air tebu.

Serda Ghazli berharap, Babinsa yang ada di jajaran di TNI Angkatan Darat agar dapat membuat pupuk yang terbuat dari keong tersebut. Karena sebagai Babinsa harus bisa meningkatkan ketahanan pangan di suatu desa dan langsung mendampingi para petani dalam penanaman padi. Semoga bermanfaat bagi semua komunitas petani dan teritorial.

Sementara, warga Manyak Payed Aceh Tamiang, Maryanto saat dikonfirmasi melalui telepon seluler mengatakan, pihaknya sangat berterimakasih kepada TNI khususnya Kodam Iskandar Muda yang mendukung program pemerintah tentang pertanian demi meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

“Kami sangat berterimakasih kepada TNI, khususnya kepada Babinsa yang telah mendukung program pertanian. Dengan adanya pupuk keong, hasil panen padi kami bisa meningkat, semula dari delapan ton sekarang menjadi 10 ton per hektar,” ucap Maryanto saat dikonfirmasi melalui telepon seluler.

Selain itu, Aiptu M. Zakaria

Siregar selaku Babinkamtibmas Polsek Birem Bayeum mengatakan bahwa Babinkamtibmas sangat terbantu oleh kegiatan yang dilaksanakan oleh Babinsa. “Selama

## “SERDA GHAZLI BERHARAP, BABINSA YANG ADA DI JAJARAN DI TNI ANGKATAN DARAT DAPAT MEMBUAT PUPUK YANG TERBUAT DARI KEONG TERSEBUT”

ini saya dan Babinsa telah terjalin hubungan kerja yang baik, salah satu contoh saling memberikan masukan dan informasi,” katanya.

Ia mengatakan, menciptakan suatu kondisi lingkungan yang aman dan terkendali merupakan tugas kepolisian, seringkali tak mampu mengendalikan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat karena luasnya wilayah yang dijangkau apalagi terdapat di daerah-daerah terpencil. Kondisi-kondisi ini juga tentunya akan melibatkan aparat terkait, diantaranya adalah peran Babinsa, karena Babinsa dari segi strategi maupun kekuatan dalam menangkal lawan lebih baik ketimbang perangkat lainnya.

Teungku Ilyas sebagai tokoh agama Desa Aramia mengatakan bahwa peran Babinsa selama ini sangat membantu dalam kegiatan turun ke sawah dan selalu mengajak serta memberikan masukan tentang meningkatkan ketahanan pangan, juga selalu membangun komunikasi yang baik dengan apatur desa dan masyarakat dalam memecahkan berbagai permasalahan di desa.



# Pangdam IM Beri Penghargaan Kepada Babinsa



Pangdam IM beri penghargaan kepada Babinsa, Serda Gazali

**MEMPERINGATI** hari jadinya yang ke-60 tahun, Kodam Iskandar Muda (IM) menggelar acara syukuran yang dipimpin Panglima Kodam IM Mayjen TNI Tatang Sulaiman bertempat di lapangan Blang Padang Banda Aceh, Kamis (22/12). Pada acara puncak peringatan tersebut, Pangdam IM memberikan penghargaan kepada sejumlah prajuritnya yang berprestasi membawa harum nama Kodam IM, baik dalam bidang militer, olahraga maupun bidang teritorial. Pemberian penghargaan dilaksanakan

bersamaan dengan pemotongan tumpeng untuk diberikan kepada empat orang perwakilan berprestasi.

Salah satu prajurit yang berprestasi dalam bidang teritorial yakni Serda Gazali anggota Babinsa Koramil 18/Birem Bayeum, Kodim 0104/Aceh Timur atas inovasinya yang telah berhasil menciptakan pupuk organik dari bahan dasar “keong”, yang mengharumkan nama Kodam Iskandar Muda. Hasilnya terbukti, dengan pemakaian “pupuk keong”, produksi padi meningkat per sekali panen.

Penghargaan tersebut

diberikan sebagai wujud perhatian pimpinan atas prestasi yang telah ditorehkan prajuritnya, yang telah mampu menjawab sekaligus menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, dengan karya inovasinya. Pangdam berharap agar para prajurit lain juga mengasah kreativitasnya untuk menciptakan inovasi-inovasi unggulan lain, yang mampu mendukung dan meningkatkan program pemerintah tentang pertanian demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain pupuk berbahan

keong, Serda Gazali juga berhasil membuat insektisida atau racun hama organik. Atas inovasinya itu, ia mendapatkan penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono.

Dan sejumlah inovasi lain seperti insektisida organik dari bahan bawang merah, bawang putih, jahe, sereh, temulawak kuning, temulawak hitam, lengkuas, dan akar tuba. Serta perangsang makanan ternak organik, berbahan dasar dari rebung, toge, jagung muda, jeruk manis, tomat, gula merah, dan air tebu.

HORMON TANAMAN

®

# BUKU-DAKU

**KODIM 0104 - ATIM**  
**KORAMIL 18/BRB**



BUKU - DAKU adalah hormon tanaman yang terbuat daripada bahan-bahan alami yang sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk masa pertumbuhan maupun di saat masa pembuahan. BUKU - DAKU sangat baik di aplikasikan pada tanaman padi, cabe bawang, tomat, mentimun dll. BUKU -DAKU tidak berbahaya bagi lingkungan nya.

**BUKU - DAKU RAJA NYA HORMON TANAMAN**



## Sersan Dua Gazali

Putra Kerinci kelahiran 1973 ini adalah lulusan Secata 1994. Ia mengawali karir sebagai Tabakpan Ru-1 Ton-1 Kipan-A Yonif 122/Tombak Sakti di Deli Serdang, jajaran Kodam I/Bukit Barisan. Dua tahun kemudian pindah tugas ke Aceh, tepatnya ke Yonif 111/Karma Bakti di Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai Tabakpan Ru-2 Ton-2 dan selanjutnya menjadi Tabak SO Ru-3 Ton-2 Kipan-A. Pada 2012, dengan pangkat Kopda, menjabat sebagai Babinsa Koramil 24/Idi Tunong, Aceh timur. Sertelah mengikuti pendidikan Secaba Babinsa (2015) dan berpangkat serda dua, saat ini ia mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Babinsa Koramil 18/Bireun Bayen, yang merupakan Koramil Model di jajaran Kodim 0104/Aceh timur, Kodam Iskandar Muda.

# CIPTAKAN PUKUP KEONG, DIBANJIRI HADIAH

**BABINSA** Ramil 18/Bireum Bayeun Serda Gazali terima bantuan *hand tractors* dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Pasalnya, Gazali adalah Babinsa berprestasi pencipta pupuk keong penyubur tanaman padi. Atas kreatifitasnya, ia pun dihadaahi alat mesin tani (Alsintan), berupa traktor roda-2. Alat untuk mengolah lahan tersebut ia terima di Makoramil 18/Brb, Rabu (4/1).

Hadiah ini merupakan hadiah ke-3 yang ia terima setelah berhasil memproduksi pupuk berbahan keong tersebut. Hadiah pertama berupa kendaraan roda dua merk Honda Mega Pro. Hadiah ini diserahkan secara simbolis oleh Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Aceh dalam rangka Upaya Khusus (Upsus) Swasembada Pangan di Makodim 0104/Langsa pada Maret 2016 lalu. Menyusul hadiah kedua, ia terima di Bandung saat mendampingi Komandan Kodim 0104/Atim Letkol Inf Amril Haris Isya Siregar pada acara rapat pertanian ketahanan pangan di bulan November 2016, hadiah langsung ia terima dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono, berupa piagam penghargaan dan uang tunai sebesar 20 juta rupiah.

Atas prestasinya tersebut, Dandim 0104/Atim merasa sangat bangga terhadap Bintaranya yang berpangkat kuning satu di lengan ini. Pasalnya, sudah tiga kali berturut-turut Serda Gazali mendapat penghargaan selama ia menjabat sebagai komandan



satuan di Kodim 0104/Atim. Dandim menghimbau agar anggota yang lain pun berlomba-lomba menciptakan prestasi, karena Kodim 0104/Atim adalah tempatnya orang-orang yang berprestasi, cetus Dandim.

Sampai saat ini, Serda Gazali sudah memproduksi 5 produk berbahan keong mas, diantaranya pupuk keong penyubur tanaman padi yang diberi nama (1) Buku Daku Raider, (2) Combuzer, (3) Hormon Buah, (4) Viter (perangsang pakan ternak), dan (5) Predator (racun hama pada tanaman).

Saat ini, pengembangan Pupuk Keong masih terus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Komposisi pupuk terus diteliti, dianalisa, dan dilakukan uji coba untuk mendapatkan produk yang lebih murah namun memiliki manfaat yang sama atau bahkan lebih besar lagi. Baru-baru ini sudah mulai dilakukan penggantian bahan non organik "EM 4 Pertanian" dengan bahan yang bersifat organik, seperti ragi tape dan air kelapa. Hasilnya, kualitasnya tidak kalah dengan saat menggunakan bahan EMP Pertanian. Produk ini mulai diluncurkan dan diterapkan pada tahun 2017.

# PRAJURTI SANDIUDHA KOPASSUS

**MENGHADAPI**

# PERANG MELALU MEDIA

01010100 01110010 011010  
00 01100001 011101  
10 01101111 0110110101010101  
110 011001011 01110011 01  
001 01100111  
110 01110010 011111  
010 01110011 0110

**Prajurit Grup-3 Sandiyudha berperan dalam menghadapi dampak dari perang melalui media. Serangan ini dapat langsung ke instalasi satuan Grup Sandiyudha maupun kepada masyarakat di sekitar satuan. Keadaan ini menimbulkan penyusutan informasi yang dapat membahayakan dan mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik secara fisik maupun non fisik.**

**E**ra globalisasi mengakibatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi dilema yang serius bagi bangsa Indonesia. Dengan adanya arus globalisasi, memaksa bangsa Indonesia untuk dapat mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sehingga wawasan, pengetahuan, dan tidak ketinggalan berita terkini di seluruh dunia. Namun hal tersebut akan menjadi sangat berbahaya dan berdampak negatif, bila tidak diimbangi dengan intelegensi dan mental yang baik. Hal-hal negatif yang dapat timbul dari era globalisasi apabila tidak dikelola dengan baik akan memunculkan budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Selain itu, terdapat kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari negara maju yang memanfaatkan situasi ini, dengan menyusupkan suatu propaganda, opini, penyusutan informasi, peretasan, dan spionase, yang dapat merugikan negara Indonesia di masa mendatang.

Di zaman modern seperti sekarang ini, perang analog atau perang menggunakan senjata serta menginvasi negara lain, telah dialihkan melalui bentuk digital yaitu melalui jaringan internet ataupun media. Kondisi ini dapat mempengaruhi segi sosial, politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan suatu negara sehingga secara tidak langsung merupakan serangan yang membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepentingan-kepentingan yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk mengumpulkan informasi dan menguasai suatu negara secara non fisik melalui jaringan dunia maya maupun media elektronik, dapat dikatakan sebagai perang melalui media.

Satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus)





merupakan salah satu komponen bangsa yang operasionalnya dibawah Panglima TNI, memiliki tugas untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keutuhan bangsa. Melalui tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Komando Atas, Kopassus sekaligus siap menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat membahayakan keutuhan bangsa.

Grup-2 dan Grup-3 Kopassus merupakan satuan dibawah Kopassus yang memiliki fungsi sebagai sandiyudha, yaitu satuan yang

melaksanakan tugas intelijen maupun tugas khusus dan sering berhubungan langsung dengan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penggalangan, baik dalam tugas maupun dalam pembinaan teritorial secara terbatas di desa binaan masing-masing batalyon. Grup-3 Kopassus harus siap menghadapi ancaman yang mungkin timbul di wilayah tugas maupun wilayah sekitar satuan. Selain itu, Grup-3 Kopassus mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional bagi jajaran komandonya dan melaksanakan pembinaan teritorial, serta OMP dan OMSP

sesuai petunjuk dari Komando Atas. Prajurit Grup-3 Sandiyudha berperan dalam menghadapi dampak dari perang melalui media, baik serangan langsung ke instalasi satuan Grup Sandiyudha maupun kepada masyarakat di sekitar satuan, serta penyesatan informasi yang dapat membahayakan dan mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik secara fisik maupun non fisik. Kondisi kemampuan Prajurit Sandiyudha saat ini dirasakan belum optimal untuk menghadapi perang melalui media sehingga perlu dirumuskan langkah-langkah untuk mengoptimalkannya.

# PERANG MELALUI MEDIA

SAAT ini, penjajahan yang dilakukan oleh negara maju terhadap negara yang berkembang dalam mencapai kepentingan, dilakukan dengan berbagai macam cara yang lebih halus dan modern. Indonesia yang memiliki sumber kekayaan alam melimpah dan letak yang strategis, tidak akan luput dari sasaran negara-negara maju. Untuk menghadapi terjadinya perang melalui media di Indonesia, TNI berupaya mengantisipasi dengan menyatukan pemikiran seluruh komponen bangsa, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tetap solid dan berpikir kritis, rasional, dan tidak gegabah dalam menerima perkembangan era globalisasi. TNI juga tetap berpegang teguh pada landasan yang dijadikan sebagai pedoman Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu landasan idiil (Pancasila), konstitusional (UUD 1945), visional (wawasan nusantara), dan konseptual



(ketahanan nasional).

Sebagian masyarakat dan aparat negara perlu mengetahui, saat ini terdapat banyak hal yang perlu diwaspadai dari perkembangan global, salah satunya adalah serangan-serangan yang dilancarkan secara non fisik, misalnya melalui media. Sasaran perang melalui media adalah seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, dengan tujuan berupa lunturnya budaya bangsa dan persatuan bangsa, lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta spionase terhadap instalasi vital melalui berbagai cara, baik penyadapan maupun aplikasi permainan (*games*) berbasis *geo location*, yang dapat melihat dan merekam pencitraan secara riil/nyata di suatu wilayah tertentu, seperti yang sekarang sedang marak. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan keterangan suatu wilayah, yang kedepan dapat membahayakan keamanan negara. Adapun sasaran dari perang melalui media ini adalah:

## **BIDANG IDEOLOGI**

Menimbulkan keraguan pada ideologi Pancasila, kemudian melakukan penanaman ideologi baru yang bertentangan dengan Pancasila, melalui

cara-cara yang halus dari media.

## **BIDANG POLITIK**

Membentuk opini dan menanamkan rasa tidak percaya kepada pemerintah sehingga keadaan politik menjadi kacau dan cenderung untuk melakukan hal-hal licik.

## **BIDANG EKONOMI**

Melemahkan sektor pertanian dan industri dalam negeri, dengan memunculkan opini bahwa barang impor lebih berkualitas sehingga konsumen lebih memilih barang impor. Akibatnya, industri dalam negeri akan semakin terpuruk.

## **BIDANG SOSIAL BUDAYA**

Menyusupkan budaya-budaya negatif terhadap generasi muda melalui berbagai media dan menyelundupkan NARKOBA dengan berbagai cara sehingga generasi muda bangsa Indonesia rusak sehingga di masa mendatang akan mudah dikuasai.

## **BIDANG HANKAM**

Mengadu domba aparat keamanan negara, baik TNI maupun Polri, dan menanamkan citra buruk aparat keamanan kepada masyarakat sehingga





mereka membenci aparat keamanan, serta melakukan spionase terhadap segala aspek kehidupan melalui berbagai teknik spionase, bahkan dengan aplikasi di internet seperti yang ada sekarang, yaitu *games* berbasis *geo location*.

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap-tahap perang melalui media adalah:

### TAHAP I MENGUMPULKAN KETERANGAN

Sasaran kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan melalui intelijen untuk memperoleh data dan menganalisa data yang ada untuk membaca kebiasaan, celah, dan strategi guna menentukan tema dan teknik dalam melakukan serangan melalui media.

### TAHAP II UJI COBA

Melancarkan kegiatan penyusunan ide-ide, isu-isu, dan opini, serta melihat efeknya terhadap segala lini kehidupan bangsa Indonesia, selanjutnya melakukan pengkajian untuk memperoleh hasil yang lebih besar.

### TAHAP III SERANGAN NON FISIK

Melakukan serangan-serangan media secara terstruktur, masif, dan menggunakan cara-cara yang lembut sehingga dalam waktu yang lama akan memperoleh hasil maksimal, yaitu merusak generasi muda dan memunculkan konflik-konflik yang secara tidak langsung akan terbentuk sendiri, serta memanfaatkan segala peluang untuk dapat mengintai dan memata-matai segala aktivitas keamanan negara, melalui aplikasi

media sosial, dan lain-lainnya.

### TAHAP IV SERANGAN FISIK/INVASI MILITER

Meskipun tanpa mandat dari PBB, akan dilakukan perang konvensional untuk menghancurkan kekuatan fisik, apabila kondisi negara Indonesia telah lemah secara mental ideologi, nasionalisme, dan pertahanan keamanannya.

Mencermati dinamika situasi dan kondisi yang ada, di mana perang melalui media sudah mulai meresahkan masyarakat dan keutuhan bangsa dapat terancam di masa mendatang, maka perlu adanya tindakan dari setiap warga

dengan ancaman perang melalui media, Grup Sandiyudha memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat guna meminimalisir dampak dari perang melalui media.

Saat ini dan ke depan, tugas dari Prajurit Sandiyudha semakin berat, mengingat tuntutan tugas sudah tidak lagi hanya pada perang atau pertempuran, tetapi lebih kepada perang non fisik sehingga tuntutan kemampuan dan profesionalisme yang andal sangat diutamakan dalam pelaksanaan tugas. Beranjak dari kemampuan dan profesionalisme tersebut maka Prajurit Kopassus khususnya Prajurit Sandiyudha harus

memenuhi standarisasi

kemampuan yang telah diprogramkan oleh Kopassus, ditambah dengan kemampuan Sandiyudha, dalam hal ini ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melihat potensi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebhinekaan, serta ancaman terhadap objek vital nasional yang berisiko tinggi, jika ancaman

tersebut terjadi maka upaya untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dari segala bentuk adu domba harus menjadi perhatian khusus. Oleh karena itu, diperlukan kebulatan tekad, keterbukaan, kejujuran, dan keharmonisan komunikasi sesama komponen bangsa, termasuk TNI untuk menangkai terjadinya perang melalui media.



negara Indonesia termasuk TNI sebagai salah satu komponen bangsa. Grup Sandiyudha Kopassus sebagai bagian dari satuan TNI, khususnya TNI AD, memiliki peran yang sangat penting karena merupakan satuan yang beroperasi di bidang intelijen, baik penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan, yang berhubungan langsung dengan masyarakat tertentu. Dihadapkan

# KEMAMPUAN PRAJURIT SANDIYUDHA

## ASPEK INTELEKTUAL

Kemampuan intelektual adalah hal yang sangat penting dan harus dimiliki Prajurit Sandiyudha untuk menghadapi perang melalui media, yang mengedepankan bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, teknologi, informasi, ilmu pemikiran, agama, hukum, dan psikologi, dengan sasaran masyarakat, aparatur pemerintah, aparat keamanan, dan instalasi objek. Kemampuan secara intelektual yang seharusnya dikuasai:

### *a. Kemampuan Penyelidikan*

Prajurit Sandiyudha harus mampu mengidentifikasi, menganalisa, dan memetakan setiap kejanggalan dan kerawanan, yang merupakan serangan melalui media oleh musuh.

### *b. Kemampuan Pengamanan*

Kemampuan dalam meminimalisir kemungkinan kebocoran informasi rahasia sehingga tidak ada celah bagi spionase untuk dapat meretas dan memperoleh informasi.

### *c. Kemampuan Penggalangan*

Kemampuan penguasaan wilayah dan penggalangan terhadap masyarakat harus dimiliki untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa perlu adanya keterlibatan/perlawanan masyarakat terhadap perang melalui media agar setiap serangan melalui media dapat ditangkal.

## ASPEK MENTAL

Pembinaan mental senantiasa dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan disiplin prajurit guna memberdayakan etos kerja satuan, dengan cara meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, kedisiplinan, dan ketaatan hukum sehingga diharapkan tugas satuan dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Semua itu tentu harus didukung oleh Prajurit Sandiyudha yang memiliki mental, kemampuan, kemahiran, dan keterampilan, baik dalam melaksanakan tanggung jawab dan dedikasinya dengan tinggi, maupun sikap tanggap dan peka terhadap setiap gejolak dan perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat. Untuk menghadapi dinamika perang melalui media, aspek mental merupakan pondasi dalam upaya membangun disiplin Prajurit Sandiyudha dalam rangka mewujudkan kelancaran tugas satuan dan pembinaan masyarakat. Aspek mental ini meliputi Ketaqwaan, Kedisiplinan, dan Motivasi dan Semangat.

## ASPEK FISIK

Prajurit Sandiyudha banyak melaksanakan kegiatan dan tugas yang berhubungan dengan masyarakat dalam waktu yang lama sehingga sangat sedikit waktu untuk melaksanakan pembinaan fisik. Padahal untuk mengatasi perang melalui media, memerlukan kondisi fisik yang prima dalam menganalisa dan menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat. Disisi lain, sebagai seorang prajurit, kondisi fisik yang prima masih tetap diperlukan untuk persyaratan jenjang karier.



Prajurit Sandiyudha diharapkan memiliki kemampuan, sebagai berikut:

## DI BIDANG INTELEKTUAL

Prajurit Sandiyudha diharapkan memiliki intelektualitas yang andal untuk menghadapi perang melalui media sesuai dengan jabatan masing-masing, sebagai berikut:

### Kemampuan Perwira

- » Mampu memahami permasalahan perang melalui media dan tahapan-tahapannya untuk melakukan tindakan preventif ataupun represif.
- » Mampu mengetahui objek sasaran perang, yang meliputi masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, Hankam, hukum, informasi, ilmu atau pemikiran, dan agama.
- » Mampu membaca perkembangan situasi sejak awal serta mampu menemukan persoalan-persoalan yang merupakan identifikasi dari permasalahan perang melalui media.
- » Mampu menganalisa kemungkinan urgensi dari akibat perang melalui media sehingga dapat dilakukan tindakan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
- » Mampu menjabarkan dan menganalisa rencana strategis dan kebijakan Komando Atas tentang upaya menghadapi perang melalui media.
- » Mampu melakukan



tindakan pemberdayaan seluruh kemampuan dalam rangka mencegah dan menanggulangi perang melalui media.

### Kemampuan Bintara

- » Dalam hal penyelidikan, mampu mengidentifikasi dan memetakan perang melalui media;
- » Mampu mengamankan segala akses dan celah dari kemungkinan terjadinya kebocoran informasi melalui media;
- » Mampu melakukan komunikasi sosial sebagai bentuk tindakan pemberdayaan seluruh kemampuan dalam rangka mencegah dan menanggulangi perang melalui media.

### Kemampuan Tamtama

- » Mampu mengamankan informasi dari akses dan kebocoran melalui media;
- » Mampu melakukan komunikasi sosial dengan masyarakat untuk

menangkal dan melawan serangan melalui media;

- » Mampu membuat jaringan intelijen di dunia maya dan di lingkungan masyarakat.

## DI BIDANG MENTAL

Mental Prajurit Sandiyudha yang siap untuk melaksanakan tugas, diharapkan sebagai berikut:

### Ketaqwaan

Memiliki tingkat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dilakukan secara sadar, ikhlas, dan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dari orang lain, yang menjadikan Prajurit Sandiyudha tidak akan menyimpang dari aturan dan hukum;

### Kedisiplinan

Memiliki Kedisiplinan yang tinggi dan cermat sebagai satu instrumen untuk keberhasilan pelaksanaan tugas sehingga timbulnya ketaatan didalam diri Prajurit

Sandiyudha. Disiplin dalam bermedia sangat diperlukan demi kepentingan satuan khususnya, serta demi negara dan bangsa pada umumnya. Satu orang tidak disiplin dan ceroboh, akan mengakibatkan kebocoran informasi yang dapat dimanfaatkan oleh musuh;

### Motivasi dan semangat

Memilik motivasi dan semangat yang tinggi dalam setiap melaksanakan kegiatan sehingga seluruh tugas yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik dan hasil yang maksimal. Masyarakat yang bersentuhan langsung dengan Prajurit Sandiyudha, akan menangkap getaran semangat dan memberikan efek yang positif sehingga akan mudah diterima dan mendapat simpati masyarakat.

## DI BIDANG FISIK

Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan berhasil, aspek fisik Prajurit Sandiyudha yang diharapkan, sebagai berikut:

### Kesegaran jasmani

Untuk mendukung tugas-tugas yang tidak ringan maka nilai kesegaran jasmani yang harus dimiliki Prajurit Sandiyudha minimal "70".

### Postur tubuh

Memiliki stamina yang baik dengan postur tubuh "Ideal" sehingga memiliki ketahanan fisik yang prima dalam melaksanakan tugas.



Pelaksanaan Hackathon Kartika Eka Paksi Cipta Yudha TNI AD 2016, yaitu kompetisi bagi para ahli teknologi dan IT developer Indonesia untuk menyumbang ide-ide inovatif mereka dalam pengembangan aplikasi pertahanan negara dalam rangka menyikapi peperangan informasi (information warfare) melalui media siber (cyber media).

# OPTIMALISASI KEMAMPUAN PRAJURIT SANDIYUDHA

## INTELEKTUALITAS

Tingkat *Perwira*, memiliki kemampuan:

- » Menguasai 3 kemampuan intelijen;
- » Memahami permasalahan perang melalui media;
- » Mengetahui tentang objek yang menjadi sasaran;
- » Membaca perkembangan situasi sejak awal sekaligus mampu menemukan persoalan-persoalan yang merupakan identifikasi dari permasalahan;
- » Menganalisa kemungkinan urgensi dari akibat perang melalui media;
- » Menjabarkan dan menganalisa rencana strategis dan kebijakan Satuan Atas;
- » Melakukan tindakan pemberdayaan seluruh kemampuan dalam rangka mencegah dan menanggulangi kegiatan perang melalui media.

Dengan demikian, akhirnya seorang Perwira dapat mengerti situasi dan kondisi untuk diidentifikasi permasalahannya, selanjutnya melakukan upaya penanganannya.

Tingkat *Bintara*, memiliki kemampuan:

- » Menguasai 3 kemampuan intelijen;
- » Mengamankan informasi;
- » Mengidentifikasi sasaran-sasaran dari perang melalui media dalam rangka tindakan pemberdayaan seluruh kemampuan.

Tingkat *Tamtama*, memiliki kemampuan:

- » Menguasai 3 kemampuan intelijen;
- » mengamankan informasi;
- » Melakukan pembinaan wilayah;

- » Membuat jaring-jaring intelijen, sebagai sumber informasi.

*Upaya* yang dilaksanakan:

- » Memberikan kesempatan pendidikan yang tepat;
- » Melakukan sosialisasi;
- » Diskusi;

Aplikasi, dilakukan dalam empat tahapan (sebagai *counter* dari tahapan perang melalui media), yaitu:

- » Observasi;
- » Ujicoba;
- » Evaluasi;
- » Serangan.

## MENTAL

**Ketaqwaan.** Memiliki tingkat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dilakukan secara sadar dan ikhlas tanpa ada paksaan dari orang lain sehingga dengan pendekatan kepada Tuhan secara sungguh-sungguh tersebut, menjadikan mental prajurit Sandiyudha menjadi semakin kokoh sehingga tidak akan terjadi perilaku negatif yang menyimpang dari norma dan aturan hukum yang berlaku.

**Kedisiplinan.** Memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam bermedia untuk keberhasilan pelaksanaan tugas, dengan tidak terjadi suatu kecerobohan yang dapat merugikan Prajurit Sandiyudha.

**Motivasi dan semangat.** Memiliki motivasi dan semangat yang tinggi dalam setiap melaksanakan kegiatan, sehingga seluruh tugas yang diembankan dapat dilaksanakan dengan baik



## Lettu Cpl Teguh Imam Santosa

Lahir di Banjarnegara (1987), alumni Akmil 2009. Mengawali karier di satuan Ditpalad (2009), selanjutnya bertugas di satuan Kopassus (2010) dengan jabatan Pasi Bekjat Grup-2 (2011), Pasi Harpal Grup-3 (2015), Kaunit-1 Tim-42 (2015), dan saat ini (2016) menjabat sebagai Pasi Bekpal Grup-3 Kopassus.

Pendidikan militer yang pernah dijalani adalah Diksar Para (2006), Sussarcab Cpl (2010), Sus Komando (2011), Spes Dakibu (2011), Suspasandha (2013), dan terakhir Diklapa I (2016). Sedangkan penugasan, Operasi Pamtas RI-PNG (2014).

dan dengan hasil yang maksimal. Masyarakat yang bersentuhan langsung dengan prajurit Sandiyudha akan menangkap getaran semangat dan memberikan efek yang positif sehingga akan mudah diterima oleh masyarakat, dan keberadaanya selalu dicintai dan disegani oleh masyarakat sekelilingnya.

**Upaya** yang dilaksanakan. Upaya dalam rangka optimalisasi mental prajurit Sandiyudha terdiri dari optimalisasi ketaqwaan, kejuangan dan ketaatan hukum dapat dilakukan dengan cara:

**Pembinaan rohani.** Dilaksanakan dengan memberikan “santi aji” dalam bentuk penyuluhan, nasehat dan wejangan serta pengarahan yang berbasis pada bidang keagamaan, yaitu kewajiban manusia sebagai makhluk Tuhan, yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan maupun. Sedangkan dalam bentuk “santi karma” berupa kegiatan yang menuntun Prajurit Sandiyudha untuk melakukan perbuatan yang benar.

### **Memberikan hukuman terhadap prajurit yang tidak disiplin dalam bermedia.**

Yakni memberikan hukuman terhadap Prajurit Sandiyudha yang terbukti melakukan kecerobohan baik dalam skala kecil maupun skala besar. Apabila satu prajurit saja melakukan kesalahan dalam bermedia, akan berdampak besar dan memberikan efek jangka panjang sehingga perlu adanya hukuman untuk memberikan efek jera bagi oknum prajurit tersebut sekaligus sebagai pembelajaran kepada prajurit lainnya agar lebih disiplin.

**Memberikan kesejahteraan.** Guna mengoptimalkan kemampuan Prajurit Sandiyudha maka kinerja prajurit harus diimbangi dengan kesejahteraan, agar selalu semangat dan bermotivasi tinggi dalam bertugas. Upaya yang

dilakukan adalah dengan memberikan penghargaan (*reward*) kepada prajurit yang berprestasi serta membuat kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi.

## FISIK

**Kesegaran Jasmani.** Prajurit Sandiyudha diharapkan memiliki kemampuan pada aspek kesegaran jasmani, dengan kriteria kemampuan nilai standar rata-rata yang harus dicapai minimal 70, guna mendukung tuntutan tugas Prajurit Sandiyudha yang tidak ringan, baik penugasan di perkotaan maupun di daerah dengan wilayah tugas yang luas. Dengan kondisi kesegaran jasmani yang prima, Prajurit Sandiyudha akan mampu melaksanakan tugas dengan baik dan berhasil.

**Postur Tubuh.** Membangun Postur Tubuh untuk mencapai target kesegaran jasmani yang baik, perlu didukung kondisi postur tubuh yang baik. Standarisasi dari postur tubuh yaitu perbandingan antara tinggi badan dengan berat badan, yang diklasifikasikan kedalam kategori Ideal, Harmonis, Normal dan Limit bawah/atas serta Luar limit bawah/atas. Prajurit Sandiyudha yang memiliki stamina bagus dengan postur tubuh yang Normal-Ideal, diharapkan dapat memiliki ketahanan fisik yang prima untuk melaksanakan tugas.

**Upaya** yang dilakukan adalah melalui:

- » Pembinaan latihan, yakni melakukan pembinaan fisik dan pengecekan timbangan meski sedang dalam penugasan maupun disaat latihan, dengan memanfaatkan waktu yang ada.
- » Pemeliharaan Kesehatan, yakni melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap triwulan.



■ Prajurit TNI membantu mengatasi kesulitan rakyat di bidang transportasi.



● TNI membantu penyaluran logistik bagi korban bencana.